



MERAYAKAN IBU BANGSA

Direktorat Sejarah
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
2016

Merayakan Ibu Bangsa



Direktorat Sejarah
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

2016

Merayakan Ibu Bangsa

Cetakan Pertama, Desember 2016
122 hlm, 16.5 cm x 11 cm
ISBN: 978-602-1289-42-6

Direktorat Sejarah
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Tlp. 021-572 55 78 / 021-572 50 35

Penanggung Jawab

Direktur Jenderal Kebudayaan
Hilmar Farid

Pengarah

Direktur Sejarah
Triana Wulandari

Kontributor

*Kasubdit Program, Evaluasi
dan Dokumentasi Direktorat Sejarah*
Sainih

Kasubdit Internalisasi Nilai Sejarah
Eddy Suardi

Koordinator Penerbitan

Mirwan Andan

Penulis

I Gusti Agung Ayu Ratih, Martin Suryajaya,
Melani Budianta, Siti Maemunah

Editor

M. Fauzi

Periset Foto

Barak Aziz Malinggi

Penata Letak dan Perancang Sampul

George M.D, Sutradani Lebu

Percetakan

Serpico Printing Utama
Panel Baru

Gambar Sampul: Pembukaan acara kursus politik bagi wanita yang dihadiri oleh Presiden Sukarno di Istana Yogyakarta pada 17 Desember 1947.
Sumber foto: Perpustakaan Nasional, Republik Indonesia.

Daftar Isi

Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	6
Kata Pengantar Direktur Sejarah	8
Perempuan Bergerak: Dari Ibu Rumah Tangga ke Ibu Bangsa	12
Apa Artinya Menjadi Ibu Bangsa	70
Perempuan yang Peduli	86
Perempuan Pejuang Tanah Air <i>Wawancara Siti Maemunah dengan Aleta Baun</i>	102

Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan

Dalam dokumen Nawacita yang diadopsi menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, ditekankan bahwa revolusi karakter bangsa merupakan salah satu agenda pembangunan yang teramat penting. Tanpa karakter kebangsaan yang kuat, kita akan sulit menyelesaikan tugas-tugas nasional yang hendak kita laksanakan bersama. Di sini, kebudayaan memainkan peranan penting. Dalam koridor penemuan kembali kebudayaan nasional lah kita seyogianya menjalankan usaha membangun karakter bangsa yang kuat dan dengan begitu turut membantu menyelesaikan cita-cita pembangunan nasional.

Dalam konteks itu, usaha untuk memaknai kembali Hari Ibu melalui penggalian sejarah Kongres Perempuan Indonesia Pertama adalah langkah yang perlu dilakukan. Melalui pemaknaan ulang atas sejarah ini, kita jadi menyadari peran kepeloporan yang dimainkan kaum perempuan dalam pendidikan karakter bangsa. Kongres Perempuan Indonesia Pertama, yang dilangsungkan pada 22 Desember 1928, telah membuktikan bahwa kaum perempuan bukanlah unsur pasif dalam gelombang revolusi nasional, melainkan justru memegang peranan strategis. Melalui Kongres tersebut, kaum perempuan Indonesia berhasil menempatkan cita-cita emansipasi perempuan dalam bingkai kebangsaan yang lebih luas. Mereka terlibat aktif dalam diskusi dan aktivisme yang berkaitan langsung dengan

kesejahteraan umum dan cita-cita besar bangsa Indonesia. Mereka punya andil dalam melahirkan dan merawat bangsa bernama Indonesia ini. Maka itu, mereka sudah sepatasnya disebut sebagai Ibu Bangsa kita.

Oleh karenanya, pada 22 Desember 2016, Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan peringatan Hari Ibu dengan fokus pada pemaknaan kembali gagasan historis-kultural tentang Ibu Bangsa. Tentunya kita berharap bahwa dengan cara itu, kita semua dapat merawat semangat kebangsaan dan memetik nilai-nilai kebudayaan nasional yang berguna bagi penguatan karakter bangsa serta mendorong terlaksananya tugas-tugas nasional kita.

Hilmar Farid

Direktur Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Kata Pengantar Direktur Sejarah

Pada tanggal 22 Desember 1928 sampai 26 Desember 1928, tak kurang dari 30 organisasi perempuan berkumpul di pendopo Dalem Joyodipuran, Yogyakarta, untuk menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia. Sekitar 1000 orang hadir dalam pertemuan yang menjadi momentum awal dari gerakan perempuan nasional itu. Mereka datang dari latar belakang budaya yang beraneka-ragam, dari berbagai suku dan kepercayaan. Mereka mengesampingkan semua perbedaan itu dan mengerahkan kekuatan bersama untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Mereka bersatu untuk perubahan nasib bangsanya.

Dari notulensi rapat yang tersampaikan dengan baik, kita dapat melihat rentang perhatian mereka. Tuntutan kesetaraan gender bukanlah satu-satunya isu yang dibahas. Persoalan pemberantasan buta huruf, kawin paksa, kemiskinan dan kesehatan ibu melahirkan tidak luput dari perhatian kaum perempuan angkatan 20-an itu. Encik Siti Marjam, salah seorang peserta yang berpidato dalam Kongres, menyatakan: "Jika Perikatan Perempuan Indonesia hendak menjalankan tugas sosial, hendaklah memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, mengadakan dana untuk pakaian anak sekolah yang miskin. Kedua, mengadakan dana pertolongan bayi dan ibunya di kampung-kampung. Ketiga, mendirikan rumah peristirahatan anak-anak. Keempat, mengadakan aksi untuk

menghapus buruh anak dan mengeluarkan UU Wajib Belajar. UU Wajib Belajar ini dapat menjadi perlindungan terhadap perkawinan anak-anak. Kelima, menetapkan batas jam kerja untuk melindungi perempuan yang bekerja. Keenam, membuat kursus untuk mendidik perempuan dari kampung tentang kesehatan dan cara mengurus bayi.” Dari bukti sejarah ini, tampak bahwa kaum perempuan Indonesia pada masa itu membahas masalah-masalah yang sebetulnya merupakan masalah nasional, bukan hanya masalah gender. Di kemudian hari, melalui Dekrit Presiden Nomor 316 Tahun 1959, tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu demi mengenang tonggak pertama kepeloporan gerakan perempuan dalam Kongres Perempuan Indonesia 1928. Sejak saat itu, pemerintah secara rutin memperingati Hari Ibu setiap 22 Desember.

Semangat yang melandasi Hari Ibu yang kita rayakan tiap tahun tidak sama dengan *Mother's Day* yang diperingati di tingkat internasional. *Mother's Day* kerap kali dimaknai sebagai hari untuk menghargai jasa-jasa ibu, biasanya diwujudkan dalam upaya keluarga untuk membantu meringankan tugas-tugas domestik ibu, seperti mencuci piring, menyapu, memasak dan sebagainya. Hari Ibu yang kita rayakan secara nasional sepenuhnya berbeda dari semangat itu. Hari Ibu diselenggarakan untuk merayakan usaha kaum perempuan yang bergerak bersama membangun negara atas dasar kebangsaan yang menjunjung tinggi kesetaraan gender.

Sejak Kartini, dan terutama berkat aktivitas berbagai organisasi perempuan pada awal abad ke-20, gagasan tentang perempuan sebagai Ibu Bangsa mulai muncul dalam kesadaran nasional kita. Menjadi ibu bukan soal melahirkan anak dan menjalankan kerja-kerja domestik, melainkan melahirkan bangsa dan menjalankan tugas-tugas nasional. Ada kesadaran yang kuat di kalangan perempuan masa itu untuk membangun negara. Itulah sebabnya, banyak perempuan yang terlibat dalam Revolusi Fisik, menyelenggarakan dapur umum, mengelola pasokan makanan dan pengobatan, bahkan ikut angkat senjata. Kaum perempuan punya andil dalam kemerdekaan Indonesia, karena itu mereka menuntut untuk diakui hak-haknya dalam negara yang mereka ikut dirikan.

Dalam semangat untuk mengenang itu semua lah Direktorat Sejarah dalam lingkup Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengadakan penerbitan "Merayakan Ibu Bangsa" ini. Keberadaan buku ini akan kembali menyadarkan kita bersama akan peran penting yang dimainkan kaum perempuan dalam memajukan kesadaran kebangsaan rakyat Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan. Kehadiran gerakan perempuan menjadi salah satu motor pendorong gerakan revolusi nasional yang akan memuncak pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Harapannya, melalui penerbitan buku ini masyarakat dapat menimba pelajaran yang berharga dari sejarah gerakan perempuan Indonesia dan memperdalam wawasan kebangsaan kita.

Akhirul kalam, saya ucapkan selamat membaca dan terinspirasi.

Triana Wulandari

Direktur Sejarah
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Perempuan Bergerak: Dari Ibu Rumah Tangga ke Ibu Bangsa

Martin Suryajaya*

Perempuan Dalam Masyarakat Tradisional Nusantara

Perempuan, dalam berbagai masyarakat tradisional di Nusantara sebelum abad ke-20, memegang peran beraneka ragam di lingkup ekonomi, politik dan sosial-budaya. Secara ekonomis, tidak semua perempuan di masyarakat tradisional Nusantara dikungkung dalam lingkungan domestik (kerumahtanggaan). Mereka justru berperan aktif di lapangan pekerjaan yang membutuhkan pengerahan tenaga fisik seperti bertani dan mengelola ladang; di bidang industri seperti pembuatan pakaian dan obat-obatan; bahkan di masyarakat Batak perempuan mempunyai hak mendirikan dan mengelola warung (*lapo*).

Secara politik, gambaran perempuan sebagai pemimpin muncul di banyak masyarakat tradisional Nusantara. Dalam masyarakat Aceh, dikenal peran perempuan sebagai pemimpin politik (*ulee balang*). Sosok perempuan seperti Tjut Njak Dhien dan Tjut Njak Meutia dikenal sebagai pejuang yang gagah berani memimpin para lelaki berperang melawan penjajah Belanda. Dalam cerita rakyat masyarakat Minangkabau *Kaba Cindua Mato*, dikenal sosok Bundo Kandung yang bertahta sebagai Ratu Pagaruyung dan memimpin rakyat secara bijaksana. Di Kalimantan pada



Anggota organisasi wanita Indonesia, ISTRI, berpose bersama pada 1927. Organisasi ini didirikan sesudah Kongres Pemuda Indonesia pertama. (Sumber Foto: Perpusnas)

pertengahan abad ke-19, dikenal sosok Aji Siti, janda cerai Sultan Kutai yang memerintah Kota Bangun dan memimpin pertempuran semasa mudanya.

Dalam lingkup sosial-budaya, sebagian masyarakat tradisional di Nusantara memungkinkan peran aktif perempuan di masyarakat. Di Ambon, misalnya, perempuan bisa menjadi anggota persidangan di dewan kota dan dewan gereja. Perempuan Ambon memiliki hak bersuara di tengah masyarakat. Di Minahasa, perempuan tidak mengenal tradisi pingitan yang lazim menimpa perempuan Jawa. Mereka justru aktif bergaul secara setara dengan laki-laki dan memiliki kebebasan menempuh pendidikan seperti kaum pria.

Meski begitu, bila kita meninjau kondisi umum perempuan dalam masyarakat tradisional di Nusantara, keadaannya tidak begitu cerah. Peran aktif perempuan dalam lingkup ekonomi, politik dan sosial-budaya seperti di atas hanya berlaku di wilayah tertentu, kerap kali dalam situasi khusus.

Dalam masyarakat Minangkabau yang matrilineal, wewenang adat tertinggi berada di tangan lelaki, khususnya para penghulu yang tergabung dalam lembaga adat *Ninik Mamak*. Di Bali, peran aktif perempuan di lapangan agrikultur malah memungkinkan kaum lelaki untuk bersantai main judi sabung ayam dan memegang hak eksklusif untuk menyelenggarakan upacara keagamaan. Di Jawa, peran perempuan di ranah sosial-budaya betul-betul dibatasi hingga wilayah hidupnya hanya berkisar antara dapur dan

kamar tidur. Dalam kasus-kasus tersebut, lelaki dihadirkan sebagai pusat perhatian sedangkan perempuan cuma dijadikan pelengkap saja.

Cara pandang yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kehidupan sosial sangat dominan di banyak masyarakat tradisional. Tatanan kehidupan sosial yang dibangun dari cara pandang itu disebut patriarki. Sistem sosial inilah yang dilawan pergerakan perempuan Indonesia sejak akhir abad ke-19 hingga kini.

Dalam masyarakat tradisional di Nusantara, kaum perempuan ditindas atas nama hukum adat dan hukum agama. Penindasan timbul karena cara pandang patriarkis yang mau mencari pembenaran atas penguasaan laki-laki terhadap perempuan lewat jalan adat dan agama. Kerap kali penindasan atas nama adat terjadi melalui kebiasaan yang dijadikan patokan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, karena perempuan terbiasa bekerja di wilayah domestik lalu muncul kesan seharusnya perempuan bekerja saja di wilayah itu. Padahal munculnya perempuan yang bekerja di wilayah domestik sebetulnya dilatari pembagian kerja yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Demikian pula tuntutan adat agar perempuan hanya bergerak di lingkup privat dan dijauhkan dari ranah publik. Adat pulalah yang mengharuskan seorang istri mengurus anak dan memperlakukan suami sebagai pemimpin rumah tangga.

Penindasan terhadap perempuan yang mengatas-namakan ajaran agama terjadi lewat berbagai cara, biasanya dilakukan atas dasar



Panitia Inti Kongres Perempuan Indonesia I pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta. Dari kiri ke kanan: Nyi Hadjar Dewantoro (Wanita Taman Siswa), Ny. Soekonto (Wanita Oetomo - Ketua Kongres), dan Nn. Soejatin (Poetri Indonesia). (Sumber: Perpusnas)



Suasana Kongres Perempuan Indonesia I pada 22-25 Desember 1928 yang berlangsung di Gedung Joyodipuran Yogyakarta. Dari kiri: Ny. B.Goelarso, Ny. Kartowijono, Ny. Hardjodiningrat, Nyi Hadjar Dewantoro, Ny. Soekonto (Ketua Kongres), Ny. Soenarjo Mangoenpoespito (sedang menulis), Ny. Ismoediati Saleh, Ny. Moendijah, Ny. Anwar, dan Ny. Drijowongso. (Sumber: Perpusnas)

keputusan sepihak tentang “kodrat perempuan”. Menggunakan ayat-ayat kitab suci, pendukung patriarki melabeli perempuan sebagai sosok yang tidak layak menjadi pemimpin, sebab hanya laki-lakilah yang kodratnya menjadi pemimpin. Dengan cara serupa, istri juga dianggap mesti menerima keputusan suami, bahkan kalau sang suami ingin menambah jumlah istrinya lagi. Atas nama agama, perempuan diwajibkan untuk takluk dan menurut apa kata laki-laki di segala bidang kehidupan.

Pemanfaatan ajaran adat dan agama untuk membenarkan poligami, misalnya, tampak pada petuah turun-temurun Minangkabau berikut:

“Kamu bukanlah satu-satunya istri,
suamimu akan menikahi wanita lain juga,
...
itu adalah bagian dari adat
dan juga diperintahkan oleh agama:
maka lepaskanlah dia dengan penuh kerelaan,
iringi kepergiannya dengan senyuman,
tanpa rasa sedih dan dendam.
...
berlaku baiklah kepada istri kedua suamimu
seperti yang diajarkan oleh agama”
(Vreede-De Stuers 2008: 95-96)

Suasana yang sarat ketidakadilan inilah latar bergulirnya pergerakan perempuan menuntut haknya.



Suasana Kongres Perempuan Indonesia I yang dilaksanakan di Gedung Joyodipuran, Yogyakarta, pada 22-25 Desember 1928. Kongres ini menjadi cikal-bakal ditetapkannya tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu di Indonesia. (Sumber: Perpusnas)



(Cliché's "Spartanogram")

Links.

Mevrouw Mr. Mariah Citah,
Indonesische Inleider over het
onderwerp:

„Positie van de Indonesische
Vrouw in het Nieuwlandsche”

Rechts.

Mevrouw Abdul Rahim,
Indonesische over het onderwerp:
„De positie van de werkende
Vrouw in Indonesië”



De Indonesische Vrouwen spreken.

Onder groote belangstelling van publiek, autoriteiten en volksraadsleden heeft het Derde Indonesische Vrouwencongres zijn bijeenkomsten in Bandoeng gehouden op 23 t/m 26 Juli j.l. Congresleidster was Mevrouw Emma Poeradiredja (zie frontpagina). Hierboven en beneden de verscheidene inleiders. Wij kunnen tot ons leedwezen de beeltenis niet weergeven van Mevrouw Datoe Toemenggoeng, die het onderwerp „Actief en passief Vrouwenkiesrecht” ten congresse inleidde. In het volgende nummer zullen wij een beschouwing plaatsen van een onzer medewerksters.



Links

Mejuffrouw Roemisan,
Inleider over het onderwerp:
„Jeugdopvoeding”

Rechts.

Mevrouw Soekemi,
Inleider over het onderwerp:
„Prostitutie en de bestrijding
ervan”



Berita tentang Kongres Perempuan Indonesia I, 22 Desember 1928 di Koran Bintang Mataram. (Sumber: Perpunas)



Foto diambil waktue boeka Kongres Poetri Indonesia.

Kongres Jong Java di Djokja.

Pada malem Rebo tanggal 25 djalari 26 ini boelan, Kongres J. J. jang ka XI soeda adaken receptie, bertempat di Djojodipoeran, receptie mana telah dihadiri oleh kira-kira. 1500 orang laki dan prempoan, diantaranya ada kliatan Mr. Dr. Soepomo sebagai wakilnja H. B. B. O. dan Mr. Ali Sastroamidjojo. Begitoe djoega ada banjak kliatan bebrapa prijaji jang berpangkat dari Kesultanan, dan bebrapa wakil perhimpoeanan. Keramcan ini ada digoembaraken dengan satoe gamelan, soembarangan dari K. G. P. A. A. Mangkoenegoro jang sekarang.

Djem 8 malem, toean R. T. Prawirodirdjo sebagi voorzitternja Comite Kongres laloe meboeka itoe receptie, dengan hatoerken trima kasi pada jang hadir, pada Pangeran Mangkoenegoro, pada wakil pers dan laen laen. Sesoea itoe, pimpinan receptie laloe dirahken pada H. B. J. J.

Toean Djoko Marsaid sebagi ondervoorzitter H. B. toean sarwono Prawirohardjo, kerna dalem halangan, laloe trima itoe pimpinan, dengan tida loepa hatoerken trima kasi pada jang hadir, teroetama pada Comite Kongres pada jang laen seperti biasanja Spr. melahirken menjeselnja kerna Voorzitter H. B. terpaiksa tida dapat pimpinan ini Kongres, kerna dalem halangan jang penting. Sesoea itoe spr. melahirken toeroet doeka tjita atas kematiannja toean Moedjahal Secretaris Comite jang terdjadi dengan sekenjoeng-kenjoeng.

Sesoea itoe, laloe wakil afjeeling J. J. diberi kesempatan boeat melahriken perasahannja. Oetoesan dari tjabang J. J. jang bitjara dalem itoe perjamoean, adalah dari wakil tjabang: Betawi, Soerabaja, Cheribon, Sala-

sebagi istri. Mendjoendjoeng tinggi, menghormat dan menghargai wadjab kita itoe, serta bisa melakoeken dan menangoeng aken kewadjaban ini, selaras dengan aliran djeman, jaitoe dengan djalari begini:

Merobah sendiri „ke p a n d e a n“ atawa „ke b i a s a h a n“ serta „a d a i s t i a d a t“ kita kaoem istri ini, tjotjok dengan aliran geloembang hidoep maatschappij jang semingkin lama semingkin tinggi tingkatnja. Tjotjok, hingga mendjadi keboetoeahan o e m o e m menoeeroet djamannja. Pendek, hendaklah kita kaoem istri sekarang bertenaga, beractie dan berdjaja oepaja aken bisa hidoep jang tjotjok dan pas dengan adanya maatschappij. Djikaloe kita masi tinggal keblakang, tida soeka memperdoelken keadahan kanan dan kiri, jang semingkin lama semingkin tinggi kemadjoeanja, soeda tentoe kita semingkin djoega ketinggalan di blakang sadja, semingkin lama semingkin djadi kolot dan semingkin tida ada harganja. „Tida ada harganja“ inilah teroetama jang mendjadi sebabnja kita tida dihargai, dan tida dihargai hak kita oleh sesama kita hidoep.

Apakah goenanja kita dititahken hidoep oleh Toehan di doenia, djika kita tida berharga, tida berharga sesoeatoe apa, kerna kita tida bisa apa-apa, tida bisa ikoet geloembang doenia jang soeda ditetepken oleh jang Maha Koesa moesti demikian djalannja itoe.

Solo dan daerahnja.

Arak gelap.

Pada tanggal 20 i. b. seorang nama bok Djojopawiro dari desa Bekonang

Gerakan Perempuan di Era Kolonial

Pada masa penjajahan Belanda, perempuan Indonesia hidup dalam penjajahan ganda. Di satu sisi, mereka dijajah feodalisme yang mengatas-namakan adat dan agama untuk menindas perempuan. Di sisi lain, mereka dijajah kolonialisme yang memelaratkan segenap bangsa Indonesia. Gerakan perempuan Indonesia akan terus diwarnai perlawanan terhadap penjajahan ganda ini.

Kemunculan Kartini (lahir 21 April 1879) merupakan salah satu tanggapan paling awal terhadap kondisi menyedihkan yang dialami perempuan Indonesia. Selama 1899 hingga 1904, ia menjalin surat-menyurat dengan perempuan aktivis Belanda, Stella Zeehandelaar. Dalam surat pertamanya, Kartini menceritakan kondisi perempuan Jawa masa itu:

“Ketahuilah bahwa adat negeri kami melarang keras gadis-gadis keluar rumahnya... Ketika berusia 12 tahun aku harus tinggal di rumah—aku harus masuk ‘sangkar’. Aku dikurung di dalam rumah dan sangat terasing dari dunia luar, dan aku tidak boleh kembali ke dunia itu lagi selama belum berada di sisi seorang suami, seorang lelaki yang asing sama sekali, yang dipilihkan orang tua bagi kami untuk mengawini kami, yang sesungguhnya tanpa sepengetahuan kami.” (Vreede-De Stuers 2008: 62)

Dengan rinci, Kartini membedah akar ketidakadilan yang menimpa perempuan sebangsanya. Ia mempersoalkan penindasan perempuan yang memanfaatkan alasan adat dan agama. Dalam suratnya kepada Stella, 23 Agustus 1900, ia mengkritik poligami:

“Kami tak boleh bercita-cita. Satu-satunya yang boleh kami mimpikan adalah hari ini atau besok menjadi istri yang kesekian bagi salah seorang lelaki. Aku menantang mereka yang dapat menunjukkan ketidakbenaran ini. Kaum perempuan di sini tidak boleh menyatakan keinginan apa pun; mereka begitu saja dikawinkan... dikawinkan dengan siapa saja yang dipandang baik oleh orang tuanya... Tidak setiap orang Islam mempunyai empat orang istri, tetapi dalam dunia kami tiap perempuan yang telah kawin mengetahui bahwa dia bukan satu-satunya istri suaminya, dan hari ini atau besok suami tercinta dapat saja membawa pulang seorang perempuan untuk menjadi temannya, yang memiliki hak sama atas suaminya... Hampir tiap perempuan yang aku kenal di sini mengutuk hak lelaki itu. Namun kutukan itu tak berguna, seharusnya kami bertindak.” (Vreede-De Stuers 2008: 67)

Terlepas dari kritiknya yang tajam terhadap poligami, Kartini diperintahkan ayahnya untuk menikah dengan Bupati Rembang yang saat itu memiliki tiga istri. Kartini pun menjadi korban

poligami. Beberapa hari setelah anak pertamanya lahir, Kartini meninggal akibat kekeliruan dalam proses persalinan.

Semasa hidupnya, Kartini memberi perhatian besar terhadap pendidikan perempuan yang dipandanginya sebagai langkah awal pembebasan perempuan. Ia membayangkan peran perempuan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga atau ibu untuk urusan domestik, tetapi justru lebih besar lagi sebagai "ibu masyarakat". Pandangannya itu tercermin dalam suratnya kepada profesor Belanda pada 4 Oktober 1902:

"Kami ingin menjadikan perempuan lebih cakap melakukan tugas besar yang diberikan Ibu Alam ke tangannya agar menjadi ibu: pendidik umat manusia yang utama... Kepada kaum ibu, pusat kehidupan rumah tangga, dibebani tugas besar mendidik anak-anaknya... untuk berkeluarga besar, keluarga raksasa yang bernama masyarakat, karena anak-anak itu suatu waktu akan menjadi anggotanya. Untuk inilah kami meminta pendidikan dan pengajaran bagi gadis-gadis." (Vreede-De Stuers 2008: 68-69)

Dengan demikian, Kartini memaknai ulang peran perempuan dalam masyarakat. Apa yang dikerjakan perempuan dalam ranah domestik ternyata berpengaruh luas ke ranah publik. Perempuan bukan hanya "ibu rumah tangga" tetapi juga "ibu masyarakat".

Kartini membayangkan gerakan pendidikan kaum perempuan yang akan memampukan mereka melaksanakan tugas membangun masyarakat baru yang lebih baik. Imajinasi besar ini tidak berhasil diwujudkan Kartini. Kerja penyelenggaraan pendidikan bagi perempuan berhasil dilakukan oleh Dewi Sartika, perempuan aktivis kelahiran 1 Desember 1884.

Pada 1904, Sartika mendirikan Kaoetamaan Istri, sekolah khusus untuk kaum perempuan. Sampai 1912, ia telah membangun sembilan sekolah. Dalam tulisan-tulisannya, Sartika membahas isu konkret terkait diskriminasi ekonomi atas perempuan. Ia mempersoalkan perbedaan upah antara buruh lelaki dan perempuan. Dalam hal perkawinan, pandangannya juga maju. Ia mengutuk sistem poligami sebagai "penyakit gangren" masyarakat (Wieringa 2010: 117). Lewat sekolah-sekolahnya, ia ingin membangun angkatan perempuan yang terlatih melakukan berbagai jenis pekerjaan yang selama ini dikuasai lelaki.

Geliat sekolah perempuan ini didorong lagi oleh inisiatif Conrad Theodor van Deventer, anggota parlemen Belanda yang mendorong pelaksanaan Politik Etis di Indonesia. Pada 1912, ia mendirikan Yayasan Kartini yang bekerja menyelenggarakan sekolah bagi kaum perempuan di Indonesia, kemudian dikenal sebagai "sekolah Kartini".

Pada awal abad ke-20, gerakan perempuan juga merambah pada pembangunan organisasi perempuan mandiri. Pada 1912, berdiri



Peserta Kongres Perikatan Perempuan Indonesia I pada 28-31 Desember 1929 di Gedung Nasional, Gang Kenari, Jakarta. (Sumber: Perpusnas)

Poetri Mardika (perempuan merdeka), organisasi perempuan yang didukung Boedi Oetomo. Poetri Mardika memberikan bantuan dana bagi perempuan yang ingin bersekolah, memberikan informasi seputar perikehidupan perempuan, serta menerbitkan koran mingguan yang secara aktif menggugat poligami, pernikahan dini, kawin paksa, dan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Pada 1913, selain terbit koran *Poetri Mardika*, terbit pula koran *Wanita Sworo* yang dirintis perempuan aktivis Siti Soendari. Soendari yang berpikiran maju dan mahir merumuskan gagasannya dalam tulisan, juga aktif dalam kegiatan antikolonial. Ia rajin menyumbangkan tulisan untuk *Wanita Sworo*. Selain kedua koran itu, terbit pula koran perempuan lainnya yaitu *Soeara Perampoean* (Padang), *Perempoean Bergerak* (Medan), dan *Pikat* (Minahasa).

Pada dekade belasan abad lalu itu, tumbuh pula organisasi perempuan yang berfungsi sebagai forum silaturahmi antar perempuan, contohnya Pawijatan Wanita di Magelang (1915), Wanita Hadi di Jepara (1915), dan Wanita Soesilo di Pematang (1918). Selain itu, muncul pula organisasi perempuan berbasis keagamaan bentukan Sarekat Islam bernama Wanudijo Oetomo, yang kemudian diubah menjadi Sarekat Perempuan Islam Indonesia. Demikian pula berdiri organisasi perempuan bentukan Muhammadiyah bernama Aisyiyah pada 1917. Waktu kemunculannya, organisasi tersebut fokus pada pelatihan keahlian praktis yang berkaitan kehidupan domestik perempuan dan kehidupan keagamaannya.

Peningkatan aktivitas perlawanan terhadap penjajah sepanjang dekade 1920-an ikut memberi angin bagi kaum perempuan untuk aktif dalam politik. Mereka aktif menentang kolonialisme dan berhimpun dalam departemen perempuan Sarekat Rakjat, sebuah organisasi pecahan dari Sarekat Islam. Anggota perempuan yang terlibat dalam Sarekat Rakjat mencapai ribuan jumlahnya (Wieringa 2010: 124). Selama pemberontakan melawan Belanda pada 1926-1927, mereka ikut melakukan perlawanan. Bahkan sebagian aktivisnya, seperti Moenapsiah dan Soekaesih, dibuang ke Boven Digul oleh pemerintah kolonial menyusul kegagalan pemberontakan itu.

Dalam suasana zaman dengan semangat kebangsaan yang meluap-luap inilah diselenggarakan Kongres Perempuan Pertama pada 22-26 Desember 1928. Kongres dilangsungkan tepat dua bulan setelah Kongres Pemuda Kedua yang menghasilkan maklumat Sumpah Pemuda. Inisiatif menyelenggarakan Kongres Perempuan Pertama datang dari Nyonya Soekonto (Wanita Oetomo), Nyi Hadjar Dewantara (Taman Siswa), serta Nona Soejatin (Poetri Indonesia). Kongres berlangsung di pendopo Dalem Djajadipoeran, Yogyakarta, milik bangsawan R.T. Djodjodipoero. Gedung tersebut kini kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Meski Kongres Perempuan Pertama dihadiri perwakilan 30 organisasi perempuan dengan peserta sekitar seribu orang, kongres tidak membahas masalah politik. Fokus kongres yaitu masalah pendidikan dan perkawinan. Sejumlah pandangan pun disampaikan yaitu :

- "Pergerakan Kaoem Isteri, Perkawinan & Pertjeraan", oleh R.A. Soedirman (Poeteri Boedi Sedjati)
- "Deradjat Perempoean", oleh Siti Moendjijah (Aisyiyah)
- "Perkawinan Anak-Anak", oleh Saudari Moegaroemah (Poeteri Indonesia)
- "Kewadajiban & Tjita-Tjita Poeteri Indonesia", oleh Siti Soendari
- "Bagaimanakah Djalan Kaoem Perempoean Waktoe Ini & Bagaimanakah Kelak", oleh Tien Sastrowirjo
- "Kewadajiban Perempoean di Dalam Roemah Tangga", oleh R.A. Soekonto (Wanita Oetomo)
- "Hal Keadaan Isteri di Europah", oleh Nyonya Ali Sastroamidjojo
- "Keadaban Isteri", oleh Nyi Hadjar Dewantoro

Kongres mengambil tiga kesimpulan berupa tuntutan kepada pemerintah kolonial (Vreede-De Stuers 2008:134):

1. Jumlah sekolah untuk perempuan harus ditingkatkan.
2. Perlunya ada penjelasan resmi tentang arti taklik (janji perkawinan) yang diberikan kepada calon mempelai perempuan pada saat akad nikah.
3. Perlu dibuat peraturan yang menolong para janda serta anak yatim piatu dari pegawai sipil.

Selain ketiga tuntutan itu, kongres menyerukan bahwa tanggal pembukaan kongres, yakni 22 Desember, akan diperingati setiap tahun sebagai Hari Ibu.

Terakhir, kongres berhasil mendirikan organisasi payung tempat berkumpulnya berbagai organisasi perempuan yakni Perikatan Perempuan Indonesia (PPI). Pada 26-31 Desember 1929, PPI mengadakan kongres di Jakarta sekaligus mengubah nama organisasi menjadi Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia (PPII). Inilah organisasi perempuan terbesar masa itu.

Namun, sebagian perempuan yang lebih maju pikirannya justru menilai PPII tidak punya sikap yang kokoh karena tersusun oleh federasi dari berbagai organisasi perempuan yang berbeda pandangan satu sama lain. Keputusannya cenderung kompromis sehingga sangat lemah dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.

Sebagian kalangan yang berpandangan seperti itu lalu mendirikan organisasi baru bernama Isteri Sedar. Organisasi ini dipimpin Soewarni Djojoseputro (setelah menikah dengan Mr. A.K. Pringgodigdo berubah nama menjadi Soewarni Pringgodigdo). Memilih berada di luar PPII, Isteri Sedar mengajukan tuntutan lebih maju yakni penghapusan poligami dengan mencontoh keberhasilan Mustafa Kemal Pasha di Turki. Lebih dari itu, Isteri Sedar dikenal sebagai organisasi perempuan pertama yang membawa gerakan perempuan bersatu dengan barisan gerakan nasionalis menentang kolonialisme. Isteri Sedar betul-betul membawa peranan wanita ke ranah publik.

Selama 5-18 Juli 1932, Isteri Sedar mengadakan kongres di Bandung dan menghasilkan tiga program besar yang sangat maju untuk zaman itu yaitu (Vreede-De Stuers 2008: 138-139):

1. Isteri Sedar yakin bahwa perempuan Indonesia mesti berperan aktif dalam politik karena hanya pembebasan nasional yang ditopang oleh kesatuan usaha laki-laki dan perempuan yang dapat menjamin kesetaraan hak bagi setiap warga Indonesia.
2. Isteri Sedar akan merancang rencana untuk meningkatkan kebutuhan perempuan kelas pekerja.
3. Isteri Sedar mendukung pendidikan nasional yang berdasarkan kebutuhan kelas pekerja dan prinsip kebebasan serta kepercayaan pada diri sendiri.

Ketiganya memotret orientasi Isteri Sedar ke ranah politik dan ekonomi. Organisasi ini punya warna nasionalis; sesuatu yang tak mengherankan karena beberapa anggotanya aktif dalam Partai Nasional Indonesia. Dalam kongres itu, Bung Karno hadir dan menyampaikan pidatonya tentang "Gerakan politik dan emansipasi perempuan".

Desakan Istri Sedar agar perempuan sadar politik kemudian memperoleh angin. Dalam Kongres Perempuan Kedua di Jakarta, 20-24 Juli 1935, dicapai keputusan yang cukup berani yaitu (Vreede-De Stuers 2008: 139):

1. Mendirikan komite investigasi bernama Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan.
2. Mengadopsi nasionalisme, aktivitas sosial, dan netralitas agama sebagai prinsip dasar kongres.
3. Bahwa perempuan Indonesia harus memastikan generasi baru yang sadar akan tugasnya terhadap tanah air, karena mereka adalah "ibu dari rakyat".

Di sini terbaca bagaimana pandangan Kartini ihwal perempuan sebagai "ibu masyarakat" dibuat lebih maju lagi dengan menempatkannya sebagai "ibu rakyat", atau ibu dari bangsa Indonesia itu sendiri.

Seiring meningkatnya kesadaran politik di kalangan perempuan aktivis, tuntutan hak pilih perempuan pun disuarakan. Inilah yang mewarnai Kongres Perempuan Ketiga di Bandung pada Juli 1938 dan Kongres Perempuan Keempat di Semarang pada Juli 1941. Tuntutan kepada pemerintah kolonial untuk memberikan hak pilih dan dipilih menjadi anggota Volksraad bagi perempuan mengemuka dalam kedua kongres itu. Akhirnya, pemerintah kolonial mengabdikan tuntutan itu pada momen-momen genting ketika pecah Perang Pasifik.

Gerakan Perempuan di Era Kemerdekaan

Pada masa pendudukan Jepang, seluruh organisasi yang ada dibubarkan dan kaum perempuan dihimpun dalam organisasi Fujinkai. Di situ, seluruh istri pegawai pemerintah menjadi



Suasana di depan Gedung Pemufakatan Gang Kenari. Jakarta pada 28 Desember 1929. (Sumber: Perpusnas)

anggota dengan pangkat sesuai posisi suami. Dalam Fujinkai, mereka belajar mengorganisasikan pertahanan nasional seperti mengadakan dapur umum dan latihan baris-berbaris.

Ketika proklamasi kemerdekaan dinyatakan dan pecah perang melawan Jepang dan Belanda, sebagian perempuan bergabung dalam Laskar Wanita Indonesia (Laswi) yang didirikan Nyonya Arudji Kartawinata di Bandung, Oktober 1945. Laswi merupakan barisan milisi perempuan pertama di Indonesia. Mereka aktif bertempur dengan senjata berat, melakukan sabotase di instalasi militer Belanda, atau menjadi kurir yang menyusup ke daerah lawan.

Selain Laswi, pada masa Revolusi Agustus ini berdiri pula Wanita Negara Indonesia (Wani) yang dipimpin tokoh-tokoh perempuan seperti Soewarni Pringgodigdo dan Sri Mangoensarkoro. Wani aktif mendukung perjuangan kemerdekaan dengan mengadakan dapur umum serta mengatur distribusi bahan pangan untuk gerilyawan. Pada Desember 1945, bersama sejumlah organisasi perempuan lain, Wani dilebur menjadi satu organisasi baru bernama Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) di bawah pimpinan Sri Mangoensarkoro.

Gerakan Perempuan di Era Sukarno

Ketika surat penyerahan kedaulatan ditandatangani Indonesia dan Belanda pada 27 Desember 1949, barulah Indonesia memasuki tahap kehidupan kenegaraan yang relatif stabil.

Dalam suasana ini, pada 1953 dibentuk komite perayaan 25 tahun pergerakan perempuan dipimpin Sri Mangoensarkoro. Komite ini bertanggung-jawab mengurus Yayasan Hari Ibu. Tepat 25 tahun setelah pembukaan Kongres Perempuan Pertama, pada 22 Desember 1953 diadakan perayaan besar dengan bendera Hari Ibu bergambar bunga putih dengan lima kelopak dan lima daun hijau sebagai lambang gerakan perempuan bersejarah itu. Di bawah lambang tersebut terdapat semboyan "Merdeka Melaksanakan Dharma".

Di kemudian hari, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden Nomer 316 Tahun 1959 yang menyatakan bahwa tanggal 22 Desember akan diperingati sebagai Hari Ibu, sebagai kenangan terhadap kepeloporan gerakan perempuan dalam Kongres Perempuan Pertama 1928. Dengan demikian, peringatan Hari Ibu di Indonesia sama sekali berbeda dengan yang dirayakan di tingkat internasional sebagai *Mother's Day*. Bila *Mother's Day* merupakan upaya mengapresiasi peran ibu dengan cara membantu pekerjaan domestiknya, maka Hari Ibu pada dasarnya perayaan atas pergerakan perempuan sebagai ibu dari bangsa Indonesia, sebagai para Srikandi nasional.

Pada 1947, Presiden Sukarno menerbitkan buku berjudul *Sarinah* yang menyatakan simpatinya terhadap gerakan perempuan. Dalam buku itu, Bung Karno menunjukkan akar permasalahan penindasan atas perempuan pada masa sekarang adalah feodalisme kapitalisme. Adat dan paham





Ki Hadjar Dewantara berpidato pada Kongres Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII) di Surabaya pada 4 Desember 1930. (Sumber: Perpusnas)





Dr. Soetomo menyampaikan pidatonya pada Kongres PPII di Surabaya pada 13 Desember 1930. (Sumber: Perpunas)

usang warisan masyarakat tradisional memaksa perempuan menghamba pada laki-laki di lingkup domestik. Sedangkan hubungan sosial yang terlalu mengedepankan pencarian laba dan sarat ketidakadilan memaksa perempuan menghamba pada kepentingan pemilik modal di lingkup publik. Karena itu, bagi Sukarno, kaum perempuan mesti bersatu dengan kaum laki-laki menuntaskan Revolusi Nasional yang akan mengakhiri penindasan feodalisme dan kapitalisme di Indonesia.

Pandangan Bung Karno tentang peran perempuan dalam *Sarinah* biasanya disebut sebagai pandangan “feminis-sosialis”. Artinya, Bung Karno berpegang pada dua ajaran: feminisme sekaligus sosialisme. Di satu sisi, ia mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan seperti halnya para feminis. Di sisi lain, ia meyakini tujuan emansipasi wanita sama dengan tujuan emansipasi manusia seutuhnya, yaitu perwujudan tatanan masyarakat sosialis yang setara dan tanpa penindasan antar manusia. Pandangannya itu tercermin pada bagian penutup buku tersebut:

“Ya, benar saya memakai perkataan ‘sosialisme’—tetapi pakailah perkataan lain kalau Tuan mau, asal isi maknanya sama, yakni satu masyarakat yang berkesejahteraan sosial dan berkeadilan sosial. Yang di dalamnya tiada eksploitasi manusia oleh manusia, tiada eksploitasi pula manusia-oleh-negara, tiada kapitalisme, tiada kemiskinan, tiada

perbudakan, tiada wanita yang setengah-mati sengsara [...]. Saya mengajak segenap wanita Indonesia dan segenap rakyat Indonesia mencintai dan mengejar sosialisme itu (lewat Revolusi Nasional) oleh karena pikiran saya berkata, bahwa hanya dalam sosialisme lah wanita Indonesia dan rakyat Indonesia dapat kebahagiaan, bahkan seluruh wanita sedunia dan seluruh kemanusiaan sedunia pula.”(Sarinah 2014: 330-331)

Lewat pandangannya inilah Bung Karno berhasil mempersatukan gerakan perempuan dengan gerakan kemerdekaan. Maka, tak mengherankan jika *Sarinah* menjadi bacaan penting di kalangan perempuan aktivis setelah kemerdekaan.

Sejak proklamasi kemerdekaan, perempuan tampil di pusat politik nasional, misalnya Maria Ulfah menjadi Menteri Sosial, S.K. Trimurti menjadi Menteri Perburuhan, dan Salawati Daud menjadi Walikota pertama Makassar. Organisasi-organisasi perempuan pun hidup lagi. Dua di antara berbagai organisasi itu yang lantang menyuarakan kepentingan perempuan adalah Perwari dan Gerakan Wanita Sedar (Gerwis).

Gerwis didirikan pada 1950, lima tahun setelah Perwari. Kedua organisasi itu diwarnai semangat feminis atau itikad emansipasi perempuan. Khusus Gerwis, warna feminis juga bercampur dengan semangat sosialis yang ingin memperjuangkan kesetaraan ekonomi dan politik serta menjunjung asas kerakyatan.





Para peserta dan pengurus Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung pada 23 Juli 1938. (Sumber: Perpunas)

Baik Perwari maupun Gerwis aktif menentang poligami dan memprotes Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1952 yang menetapkan peraturan pembagian uang pensiun pegawai negeri berpoligami. Peraturan ini dianggap memberi ruang bagi poligami di kalangan pejabat serta menimbulkan kesan adanya "pemborosan uang negara untuk mengongkosi poligami" (Wieringa 2010: 185). Mereka menuntut pengesahan Undang-Undang Perkawinan yang melarang poligami dan menjamin hak-hak perempuan dalam lembaga perkawinan.

Namun, pada 1954 Presiden Sukarno melakukan poligami dengan mengawini Hartini sambil tetap mempertahankan istrinya ketika itu, Fatmawati. Hal ini membuat gerakan perempuan terpecah. Gerwis, yang pada 1954 berubah nama menjadi Gerakan Wanita Indonesia, sulit menyatakan protes besar-besaran karena khawatir hal itu akan menguntungkan kepentingan pro-kapitalis yang tidak suka dengan kepemimpinan Bung Karno. Sebaliknya, Perwari terang-terangan mengerahkan massa perempuan untuk mendemo Bung Karno dan Hartini. Tetapi gerakan ini tidak digubris oleh Presiden.

Dengan kepemimpinan S.K. Trimurti, Salawati Daud dan Umi Sardjono, Gerakan Wanita Indonesia melakukan kegiatan pemajuan hak-hak wanita. Mereka memperjuangkan agar jabatan kepala desa dapat diduduki perempuan. Mereka memperjuangkan cuti haid dan cuti hamil bagi wanita pekerja, kesetaraan upah antara lelaki

dan perempuan, penghapusan perkawinan anak dan kawin paksa. Gerakan Wanita Indonesia juga menempatkan gerakan perempuan sebagai bagian dari pergerakan kebangsaan seutuhnya dan karena itu ikut memperjuangkan persoalan rakyat Indonesia. Bersama petani, mereka berhasil meningkatkan pembagian panen dari 1 : 12 menjadi 1 : 6. Mereka juga ikut aksi menentang kenaikan harga barang kebutuhan pokok.

Setelah peristiwa Gestok (Gerakan Satu Oktober) meletus pada 1965, Gerakan Wanita Indonesia dibubarkan atas instruksi Jenderal Soeharto. Sebagai dalih untuk mencitrakan kejahatan Gerakan Wanita Indonesia, dikaranglah cerita tentang kader-kader Gerakan Wanita Indonesia menyiksa para jenderal di Lubang Buaya. Belakangan, para sejarawan sepakat cerita itu fitnah yang sengaja dibuat oleh aparat intelejen Jenderal Soeharto (Wieringa 2010: 432-434). Kenyataan sejarah menunjukkan justru anggota Gerakan Wanita Indonesia lah yang disiksa, diperkosa, dan dibunuh dengan kejam oleh aparat militer pada masa pendirian Orde Baru.





Pembukaan acara kursus politik bagi wanita yang dihadiri oleh Presiden Sukarno di Istana Yogyakarta pada 17 Desember 1947.
(Sumber: Perpusnas)





Kursus politik bagi wanita diberikan oleh Presiden Sukarno di Istana Yogyakarta pada 17 Desember 1947. (Sumber: Perpusnas)





Presiden Sukarno menghadiri Perayaan Hari Ibu di Yogyakarta pada 22 Desember 1947. (Sumber: Perpusnas)





Kiri dan Kanan: Peserta pawai pada Perayaan Hari Ibu di Yogyakarta pada 22 December 1947. (Sumber: Perpusnas)





Kiri dan Kanan: Hari Ibu diperingati di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta pada 22 Desember 1947. (Sumber: Perpunas)





Perwakilan perempuan sedang berpidato pada Perayaan Hari Ibu di Yogyakarta pada 22 Desember 1947. (Sumber: Perpunas)





S.K. Trimurti, Menteri Perburuhan pertama dalam sejarah Indonesia, sedang menyampaikan pidato di Yogyakarta, 1947.
(Sumber: Perpusnas)





Kiri dan Kanan: Hari Ibu diperingati di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta pada 22 Desember 1947. (Sumber: Perpusnas)

Gerakan Perempuan di Era Orde Baru

Pada masa Orde Baru, gerakan perempuan dipandang mengalami kemunduran sangat parah. Sebabnya, upaya pemerintah Soeharto untuk 'menjinakkan' kaum perempuan dengan mendefinisikan ulang peran perempuan menjadi ibu di lingkup domestik saja. Peran sosial perempuan, walaupun ada, hanyalah untuk mendukung program pembangunan yang dilaksanakan kaum lelaki. Karena itu, ada pengamatan umum bahwa di bawah Orde Baru gerakan perempuan dipukul mundur ke era Kartini: kembali dipingit di ranah domestik dan hanya diakui peran publiknya sebagai pendukung pembangunan.

Menurut Suryakusuma (2011), usaha penjinakan perempuan di masa Orde Baru dilakukan lewat pengorganisasian Dharma Wanita dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Sebagai organisasi yang menghimpun istri-istri Pegawai Negeri Sipil, Dharma Wanita menjadi corong program pemerintah di tingkat pusat hingga kecamatan. Dalam organisasi ini, jabatan anggota disesuaikan dengan posisi suami di pemerintahan. Artinya, fungsi perempuan didefinisikan berdasarkan kedudukan laki-laki. Untuk desa ke bawah, pengorganisasian perempuan oleh pemerintah Orde Baru dilakukan melalui PKK. Dengan begitu, pemerintah dapat mengontrol gerak perempuan dari tingkat pusat hingga RT/RW.

Program pemerintah yang ditanamkan melalui Dharma Wanita berorientasi pada agenda pembangunan yang menempatkan peran perempuan di belakang saja. Itu tercermin pada Panca Dharma Wanita yang menjadi prinsip dasar Dharma Wanita:

1. Wanita adalah sebagai pendamping suami yang setia.
2. Wanita adalah sebagai pengelola rumah tangga.
3. Wanita adalah sebagai pendidik anak.
4. Wanita adalah sebagai pencari nafkah tambahan.
5. Wanita adalah sebagai warga masyarakat.

Dengan demikian, ditanamkan lah kesadaran terbelakang bahwa perempuan lebih baik berperan di wilayah rumah tangga dan menjalankan fungsi pendukung bagi laki-laki. Kesadaran macam inilah yang ditanamkan lewat Dharma Wanita, yang beroperasi di tingkat pusat hingga kecamatan. Selebihnya, untuk tingkat desa hingga RT/RW, peran penanaman kesadaran seperti itu dilakukan PKK. Praktiknya, program PKK memang diturunkan dari Dharma Wanita.

Meski begitu, pada masa Orde Baru tercapai juga kemajuan di sektor tertentu kehidupan perempuan, antara lain ketika Presiden Soeharto mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 atas desakan Ibu Tien Soeharto. Peraturan ini melarang pelaksanaan poligami di lingkungan Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, liberalisasi perekonomian memungkinkan perempuan untuk aktif bekerja di kantor sebagai





Maria Ulfah sedang menyampaikan pidato pada Kongres Wanita Indonesia di Jakarta pada 29 November 1950. (Sumber: Perpunas)

“wanita karir”. Liberalisasi ini juga melumpuhkan kemampuan perempuan berorganisasi karena iklim budaya individualistis yang mendorong segalanya dipecahkan seorang diri. Alhasil, tradisi berorganisasi secara politis di kalangan perempuan menyurut pada masa Orde Baru.

Usaha mandiri kaum perempuan untuk kembali bergerak secara terorganisir baru dimulai sekitar akhir dekade 1980-an. Pada masa itu, sebagian perempuan mulai aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memprotes ketimpangan sosial-ekonomi-politik di bawah Orde Baru.

Gerakan Perempuan di Era Reformasi

Pada bulan awal 1998, ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi parah sementara Orde Baru belum juga tumbang, terjadi kelangkaan susu dan harganya pun melambung tinggi. Sekelompok ibu berinisiatif menggalang dana dan menjual susu dengan harga murah. Pada 23 Februari 1998, mereka menggelar aksi di bundaran Hotel Indonesia memprotes kenaikan harga susu. Mereka berdemonstrasi di bawah ancaman “tembak di tempat” aparat militer. Tiga puluh menit selepas dimulai, aksi dibubarkan tentara dan beberapa ibu diculik menggunakan truk tentara untuk diinterogasi. Mereka ini adalah Suara Ibu Peduli (SIP).

Ibu-ibu yang menjadi inisiator dalam SIP sebelumnya telah lama berjejaring dengan berbagai gerakan LSM. Mereka menjadi salah satu pelopor kesadaran baru perempuan masa Reformasi. SIP mengembalikan semangat pergerakan perempuan sebagai Ibu Bangsa yang dimulai sejak



Gabungan sejumlah organisasi perempuan berdemonstrasi menuntut Undang-undang Perkawinan pada 1953. (Sumber: Perpusnas)



Pidato sambutan peringatan seperempat abad kesatuan pergerakan wanita Indonesia di Istana Negara Jakarta oleh Ketua Sekretaris Kongres Wanita Indonesia Ny. Maria Ulfah Santoso pada 1953. (Sumber: Perpusnas)

Kartini, diteruskan Isteri Sedar sebelum akhirnya dibungkam dengan naiknya Orde Baru.

Kini, kaum perempuan terus bergerak memperjuangkan kesetaraan dan pemajuan bangsa Indonesia. Mereka berorganisasi secara mandiri untuk menyuarakan kepentingannya dalam negosiasi terus-menerus dengan pemerintah dan kelompok masyarakat lain. Berbagai organisasi, kelompok kajian dan LSM yang berfokus pada isu perempuan pun bermunculan selepas tumbanganya Orde Baru. Gerakan perempuan kembali mengambil peran penting dalam penyelesaian tugas-tugas nasional. Pelan tapi pasti, mereka hadir kembali sebagai Ibu Bangsa.

*Staf Khusus Direktur Jenderal Kebudayaan

Disarikan dari:

- I Gusti Agung Ayu Ratih. 2008. *"Jejak-jejak Perbincangan Perempuan dalam Sejarah"*. Makalah tak diterbitkan. Jakarta: Koalisi Perempuan Indonesia untuk Demokrasi dan Keadilan.
- Cora Vreede-De Stuers. 2008. *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan & Pencapaian*, terj. Elvira Rosa, et.al. Depok: Komunitas Bambu.
- Julia Suryakusuma. 2011. *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Depok: Komunitas Bambu.
- Saskia E. Wieringa. 2010. *Penghancuran Gerakan Perempuan*. Yogyakarta: Galangpress.
- Sukarno. 2014. *Sarinah*. Jakarta: Yayasan Bung Karno & Penerbit Media Pressindo.
- Susan Blackburn. 2007. *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*. Jakarta: Yayasan Obor dan KITLV.

Apa Artinya Menjadi Ibu Bangsa?

I Gusti Agung Ayu Ratih*

Kita sekarang haroes mentjari dasar jang tetap oentoek memberi arti kepada keperempoeanan. Dan arti itoe tidak lain, tidak boekan, hanjalah haroes didasarkan kepada "Kemanoesiaan".

*Sri Mangoensarkoro pada Kongres
Perempuan Indonesia II (1935)*

Kita akrab dengan istilah "bapak bangsa" atau "bapak pendiri bangsa", tapi kita jarang mendengar istilah "ibu bangsa". Pejuang-pejuang perempuan seperti, Nji Ageng Serang, Tjoet Njak Dhien, atau Maria Walanda Maramis lebih dikenal sebagai pahlawan nasional, bukan ibu bangsa. Hanya dalam lagu *Ibu Kita Kartini* tersirat pengakuan bahwa Kartini adalah ibu bangsa. Sebenarnya, apa arti ibu bangsa itu? Apa pentingnya peran mereka bagi negeri ini?

Ketika Kartini mulai menuliskan gagasan-gagasannya di awal abad ke-20, kebanyakan kaum perempuan Nusantara belum berpikir tentang kebutuhan perempuan membangun kekuatan dirinya dan kaitannya dengan kemajuan bangsa. Mereka terbiasa memikirkan keluarga dan masyarakat sekelilingnya, tetapi tidak tentang ketidakadilan yang khusus menimpa kaumnya, seperti poligami, pernikahan dini, atau perdagangan seksual. Adalah Kartini yang merumuskan dengan jernih bahwa kalau bangsa Jawa ingin maju dan setara dengan bangsa Eropa, kaum perempuannya harus sadar akan kekuatan

dirinya dan siap bekerja untuk masa depan bangsanya.

Bagi Kartini perempuan tidak dapat lagi diremehkan, "Perempuan itu sokoguru peradaban!"¹ Sebagai ibu mereka melahirkan dan merawat generasi baru suatu bangsa. Apabila ibu tidak diberi pengetahuan yang cukup tentang hal-hal yang berguna bagi kesejahteraan dirinya dan sang anak, apabila ibu hidup dalam kemiskinan dan tidak bahagia, maka bangsa Jawa akan tetap tertindas dan tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Pendapat ini dikuatkan oleh perempuan pemikir dari tanah Minangkabau, Roehana Koeddoes, yang meyakini bahwa kita seharusnya menjalankan amanah Al-Quran yang pertama, yaitu "*Iqra!*" (Bacalah!), dengan mengizinkan perempuan menempuh pendidikan. Roehana juga beranggapan bahwa perempuan sangat mungkin berperan, "kalau bukan sebagai pemimpin, sebagai orang yang pandai."²

Gagasan-gagasan baru untuk memajukan perempuan ini menjadi inspirasi bukan saja bagi kaum perempuan, tetapi juga bagi mereka yang terlibat dalam pergerakan nasionalis secara umum. Kritik pedas Kartini terhadap tradisi feodal priyayi Jawa dan keangkuhan penguasa kolonial Belanda secara khusus membuka wawasan kaum perempuan akan kekuatan-kekuatan yang menindas dirinya. Lelaki-lelaki pejuang pun perlahan-lahan melihat keluasan dan kedalaman dampak penjajahan Belanda dan bertahannya tradisi kolot sampai ke ruang-ruang yang selama ini dianggap pribadi: rumah tangga. Namun, untuk menarik perempuan begitu saja ke luar rumah tidak mudah karena mereka segera akan dianggap menyalahi kodratnya sebagai pengurus keluarga dan rumah tangga.

Di sini lah dukungan dari kaum laki-laki yang terlibat dalam pergerakan nasionalis sangat diperlukan. Kepercayaan akan datangnya zaman baru, kemajuan, dan lahirnya manusia-manusia baru harus menjadi semangat bersama. Perempuan mulai diajak mengenal dunia sosial baru di luar rumah atau lingkungan kerja mereka oleh lelaki terdekat yang terlibat dalam pergerakan nasional, apakah itu bapak, suami, saudara kandung, atau kerabat. Lelaki-lelaki pejuang ini pun perlahan-lahan melihat pentingnya melibatkan perempuan dalam kerja-kerja politik mereka sebagai kawan seiring. Berikut cuplikan artikel yang ditulis oleh laki-laki pengarang atas nama perempuan dalam salah satu majalah pergerakan untuk umum:³

Menoeroet keadaan doenia pada ini wektoe, seharoesnjalah kita kaoem perempoean menoeloeng pakerdjaan kaoem lelaki, jaitoe pakerdjaan menoedjoe keperluan oemoem. Soedah berabad-abad kita kaoem perempoean boleh dikata tidoer poeles, tidak pernah melihat sinar matahari. Sebab moelai djaman doeloe sampai sekarang kita kaoem perempoean dipandang seperti perhiasan roemah tangga, dan mendjadi kepalanja koki. Tapi boeat ini djaman itoe atoeran haroes dirobah.

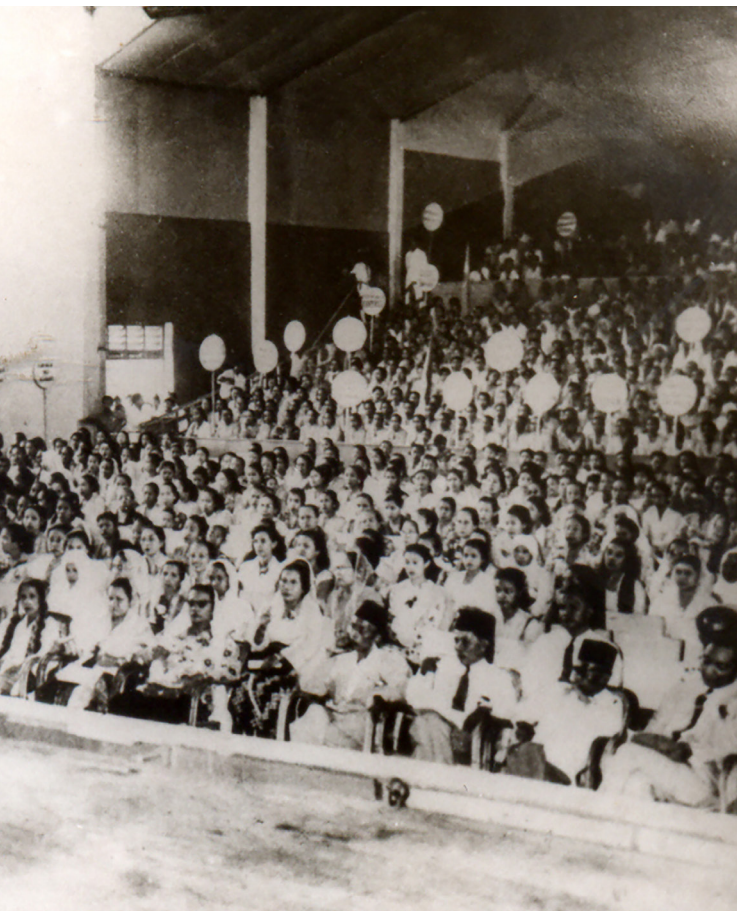
Kongres Perempuan Indonesia (KPI) yang pertama boleh dikatakan merupakan hasil dari pergaulan antara kaum perempuan pejuang dan laki-laki tersebut. Diadakan hampir dua bulan setelah Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda, KPI menjadi ruang terbuka

bagi perempuan dari berbagai organisasi untuk membicarakan dan memperdebatkan soal-soal yang menjadi keprihatinan perempuan dalam kerangka pembangunan bangsa baru. Walaupun mereka yang hadir tidak mengangkat perihal kemerdekaan Indonesia, dalam perbincangan mendetil tentang tugas-tugas ibu sebagai perawat keluarga tersirat kesediaan kaum perempuan untuk mempersiapkan keluarga yang sehat, sejahtera dan terdidik sebagai basis negara yang kukuh.

Para perempuan pejuang pada satu titik bersepakat untuk menyebut diri mereka "iboe bangsa". Sedikit banyak ini cara mereka untuk dapat terlibat dalam kegiatan sosial-politik dan diakui sumbangsinya tanpa menimbulkan cemooh terhadap kesibukannya di luar rumah. Seperti dikatakan Sri Mangoensarkoro dalam KPI II, mereka tetap ibu, yang menomor-satukan keluarga, tetapi mereka berpikir tentang bangsa dan mengikuti bapak bangsa dalam kegiatan-kegiatannya "oentoek memberi pengaroeh keiboeanja."⁴

Perempuan-perempuan pejuang memberi makna istilah ibu bangsa dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan organisasi masing-masing. Titik tekannya pada pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga. Tepat dalam hal kesejahteraan keluarga ini lah sebagian perempuan pejuang (dan juga laki-laki) mempersoalkan poligami. Bagi mereka poligami mengancam kesejahteraan keluarga dan kekukuhan bangsa karena praktik tersebut dapat menimbulkan perselisihan yang melemahkan keluarga sebagai fondasi bangsa. Perdebatan tentang poligami tidak pernah usai sepanjang sejarah perjuangan kaum perempuan. Di setiap





Peringatan Hari Ibu di Gambir, Jakarta, pada 22 Desember 1954.
(Sumber: Perpusnas)





Fatmawati Sukarno bersama segenap lapisan masyarakat dan organisasi perempuan menyambut Hari Ibu di Istana Merdeka, Jakarta, pada 22 Desember 1960. (Sumber: Perpusnas)

periode organisasi-organisasi perempuan selalu akhirnya mengambil langkah kompromi demi menjaga persatuan nasional.

Yang juga penting dicatat dari masa sebelum kemerdekaan adalah perjuangan kaum perempuan tetap berpijak pada perbedaan antara kegiatan-kegiatan di rumah dengan yang di luar rumah. Sebutan ibu bangsa boleh dikatakan lebih sebagai simbol keterlibatan perempuan dalam pergerakan nasional, apa pun kegiatan mereka. Sampai perang kemerdekaan menghancurkan batas-batas ruang pribadi dan ruang publik, dan perempuan harus memperluas tugas-tugas keibuan sampai ke wilayah pertempuran, ibu bangsa berubah rupa. Mereka bergabung dalam laskar-laskar dan bertanggung jawab untuk, antara lain, mengupayakan suplai logistik, menyelenggarakan dapur umum dan merawat prajurit yang sakit.

Keterlibatan perempuan secara aktif dalam setiap tahap perjuangan bangsa agaknya sangat menarik perhatian Sukarno. Di tengah kemelut peperangan mempertahankan republik baru (1947), Sukarno menyelenggarakan kursus politik bagi perempuan dan mendorong perempuan untuk tidak hanya memikirkan kepentingan perempuan saja, tetapi bahu-membahu dengan laki-laki menuntaskan revolusi Indonesia. Kumpulan catatan untuk kursus ini kemudian diterbitkan dalam buku *Sarinah*. Selain itu, Sukarno hampir selalu menyempatkan diri untuk hadir dalam pembukaan pertemuan-pertemuan perempuan yang sifatnya nasional, dan menegaskan kembali pandangan-pandangan yang ia sampaikan di *Sarinah* :⁵

Wanita Indonesia adalah semuanya,
Saudara-saudara, tegap-tegap ikut

berdentam-dentam didalam barisan revolusioner Rakjat Indonesia. Orang tidak bisa menggambarkan masjarakat Indonesia tanpa mengetahui wanita Indonesia. Orang tidak bisa mengchajalkan bagaimana toh Rakjat Indonesia itu, tanpa dalam ingatannja djuga menjebut dan melihat wanita Indonesia. Pendek [*sic*], Saudara-saudara, wanita Indonesia adalah betul-betul satu muka mutlak, muka mutlak daripada Revolusi Indonesia ini.

Pengalaman perempuan di medan perang dan seruan Sukarno yang mendorong perempuan untuk lebih banyak bergerak di luar rumah sampai batas tertentu mengubah gagasan keibuan yang terpusat pada keluarga batih. Sepanjang 1950an sampai 1 Oktober 1965 ibu bangsa dituntut untuk bekerja sepenuh-penuhnya dalam pembangunan negara dan bangsa, dan memperlakukan bangsa sebagai keluarga sendiri. Dengan semangat gotong-royong para ibu bergerak secara massal menyelenggarakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf, tempat penitipan anak, sekolah, klinik kesehatan dan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial lainnya. Bayangan ideal tentang perempuan di masa ini adalah perempuan yang dapat menjadi istri, ibu, sekaligus kawan seperjuangan yang aktif di luar rumah.

Gerak massal para perempuan di ruang publik ini mencerminkan bagaimana pemerintah Sukarno berusaha mengajak siapa saja untuk merawat negara yang baru lahir ini dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Alhasil, kaum ibu di kota sampai ke wilayah perdesaan tidak ragu-



Perwakilan Irian Barat (sekarang Papua) dalam upacara pembukaan Kongres Wanita Indonesia X di Istora Senayan Jakarta pada 24 Juli 1964. (Sumber: Perpusnas)

ragu untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan politik. Mereka membuka rumah-rumah mereka untuk bermacam kegiatan masyarakat sehingga rumah tidak lagi menjadi ruang pribadi melainkan ruang sosial. Politik berbangsa dan bernegara menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan setiap sosok yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan belajar memahami apa itu artinya menjadi warga negara yang merdeka.

Puncak dari penggalangan kaum perempuan ini adalah ketika pemerintah Sukarno mencanangkan operasi Dwi Komando Rakyat (Dwikora) untuk mengganyang Malaysia. Para ibu dari segala lapisan masyarakat, dari istri menteri sampai perempuan tani, ikut serta dalam pelatihan-pelatihan sukarelawati (sukwati) yang dipimpin tenaga-tenaga militer di seluruh Indonesia. Pimpinan sukwati wilayah DKI Jaya, Ny. Armistiani Soemarno, bercerita bahwa para sukwati dilatih untuk melakukan berbagai macam ketrampilan, bahkan untuk mengatasi bencana alam. "Hampir di tiap kelurahan para Sukwati membentuk kesatuan-kesatuan *Bantuan Bencana Alam* yang terdiri dari kesatuan PPPK, Dapur Umum, Angkutan, Evakuasi, Pembantu Pemadam Kebakaran, dll. guna membantu petugas pemerintah mengatasi kekacauan dan musibah." Lebih dari itu, perempuan tidak lagi dibatasi tugasnya untuk menjaga garis belakang, tetapi juga dilatih untuk menggunakan alat-alat tempur agar siap diberangkatkan ke garis depan.⁶

Proyek ibu bangsa yang berlangsung lebih dari setengah abad mengalami kehancuran luar biasa setelah 1 Oktober 1965. Salah satu komponen penggerak utama kaum ibu sampai ke tingkat

desa, Gerakan Wanita Indonesia, dituduh terlibat dalam penyiksaan dan pembunuhan para jendral di Lubang Buaya dalam aksi Gerakan 30 September 1965. Tuduhan ini sampai hari ini belum dapat dibuktikan kebenarannya. Namun, Gerakan Wanita Indonesia telah dibekukan dan pimpinan, anggota, serta simpatisan Gerakan Wanita Indonesia disingkirkan dalam operasi penumpasan G30S. Untuk jangka waktu yang lama perempuan dipisahkan dari dunia politik. Mereka yang berpolitik dan melawan pemerintah akan dituduh "Gerakan Wanita Indonesia". Para istri diharapkan mendukung kegiatan suami hanya melalui organisasi-organisasi yang direstui pemerintah. Kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara mandiri, sukarela dan bergotong-royong diambil alih oleh pemerintah di bawah rubrik Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Peringatan resmi Hari Ibu pada 22 Desember selama ini tidak pernah menyinggung sumbangsih kaum perempuan yang sudah memperjuangkan layanan-layanan paling mendasar bagi suatu bangsa yang merdeka: pendidikan dan kesehatan. Berangkat dari keprihatinan terhadap keadaan perempuan yang terbelakang di masa penjajahan, para ibu bangsa mencari jalan agar anak-anak Indonesia dapat lahir dan besar dalam kehidupan keluarga yang terdidik, sehat dan bahagia. Pengetahuan-pengetahuan dasar tentang kesehatan reproduksi, sistem perawatan kesehatan ibu dan anak, maupun sejumlah perangkat perlindungan hukum bagi perempuan merupakan warisan perjuangan ibu bangsa. Sudah saatnya mereka memperoleh pengakuan lebih besar atas jerih payah mereka merawat bangsa ini.



Peringatan Hari Ibu dan Hari Sosial di Departemen Sosial, dipimpin oleh Menteri Sosial Ny. Rusiah Sardjono SH. Jakarta, 22 Desember 1965. (Sumber: Perpusnas)



Sukarno berjalan bersama para peserta perayaan Hari Ibu, 22 Desember 1965. (Sumber: Perpusnas)

Catatan belakang:

1. Surat Kartini kepada Nyonya Abendanon, 21 Januari 1901.
2. Fitriyanti. *Roehana Koeddoes: Perempuan Sumatra Barat*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2001. Hal. 23-29.
3. Rangsang. "Kaoem Merah," *Hidoep*, No. 4, 1 Oktober 1924, dikutip dalam Razif. [2005]. "Bacaan Liar: Budaya dan Politik di Zaman Pergerakan," manuskrip tidak diterbitkan.
4. Nj. Sri Mangoensarkoro. "Arti Perempoean sebagai Iboe Bangsa," dalam Kongres Perempuan Indonesia II (1935).
5. Sukarno. "Wanita Indonesia selalu ikut bergerak dalam barisan revolusioner!" Amanat Presiden Sukarno pada upacara pembukaan kongres ke-10 Kongres Wanita Indonesia di Istora Gelora "Bung Karno", Senayan, Jakarta, 24 Juli 1964. Penerbitan Khusus Departemen Penerangan R.I. No. 332.
6. Ny. Armistiani Soemarno Sosroatmodjo. [1986]. *Bukit Kenangan*.

Perempuan yang Peduli

Melani Budianta*

Suara lagu *Ibu Pertiwi* dan *Kasih Ibu* bergema di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 4 Maret 1998. Saat itu tiga perempuan, Karlina Supelli, Gadis Arivia dan Wilasih Noviana diadili karena bersama sejumlah perempuan melakukan demonstrasi “Suara Ibu Peduli” di bundaran Hotel Indonesia (HI) pada 23 Februari. Mereka menggugat kebijakan ekonomi yang membuat harga susu melonjak, anak-anak kekurangan gizi, dan ibu-ibu di keluarga miskin semakin “bingung mengatur belanja dan memikirkan masa depan keluarganya” (pledoi Gadis Arivia, 1998).

Gerakan yang diprakarsai para perempuan aktivis dengan Yayasan Jurnal Perempuan ini tidak sekadar turun ke jalan, tetapi juga mengumpulkan dan membagi susu murah untuk para ibu yang membutuhkan. Simbol dan seruan “Ibu yang peduli” dengan segera disambut oleh ibu-ibu dari berbagai wilayah Jakarta, yang merasa kebutuhan mereka disuarakan dan diperhatikan.

Simbol “Ibu yang peduli” yang menjadi populer itu sebetulnya mengandung permasalahan yang disadari oleh perempuan aktivis, termasuk pengagasnya. Apakah hanya Ibu yang peduli dan yang bertugas mengurus persoalan gizi dan masa depan anak-anak (Bapak tidak)? Apakah semua Ibu peduli? Apakah semua perempuan dikodratkan menjadi Ibu? Memitoskan Ibu berisiko mengentalkan stereotip yang mengotakkan perempuan.

Tetapi pilihan untuk memakai kata “Ibu” pada saat itu merupakan suatu strategi yang efektif untuk menghadapi kekuasaan pemerintah Orde Baru dan militer. Kata “Ibu” membangkitkan kedekatan emosional pada semua orang, laki-laki maupun perempuan, tentara, penguasa maupun orang biasa – karena semua orang punya ibu. Perlu diingat bahwa saat itu suasana sedang dalam kondisi siaga satu – dan ini adalah demo pertama di tahun 1998 yang kemudian disusul oleh demo mahasiswa dan masyarakat untuk menurunkan Soeharto. Mitos “Ibu” berpotensi melunakkan kekerasan militer.

Gadis Arivia menyebutkan pilihan itu sebagai “strategi representasi” untuk membungkus “politik susu” – suara perempuan melawan berbagai kebijakan Orde Baru yang semakin mengukuhkan kuasa, sentralistik, militeristik dan tidak lagi berpihak pada rakyat kecil. Kita juga perlu ingat bahwa dalam banyak hal, Orde Baru meletakkan perempuan sebagai warga nomor dua, bukan sebagai agen perubahan. Dalam organisasi Dharma Wanita, misalnya, tugas perempuan pertamanya adalah mendukung karir suami, sebaliknya perempuan yang berpolitik dianggap berbahaya. Jadi, apa yang dilakukan perempuan yang berarak membawa poster-poster dan bernyanyi seputar bundaran HI di awal 1998 adalah suatu tindakan yang berani. Dan ternyata, inisiatif ini membuahkan simpati yang besar dari masyarakat. Jaringan yang kemudian terbangun antara para aktivis, ibu-ibu dari berbagai latar belakang, dan berbagai lapisan masyarakat –menjadi sistem pendukung di hari-

hari kritis tumbangya pemerintahan Soeharto. Yang dilakukan mungkin kedengarannya sederhana, menyediakan nasi bungkus untuk mahasiswa yang berdemonstrasi. Tapi kebutuhan logistik sangat menentukan ketahanan fisik, dan dukungan “para ibu” menyalakan semangat para mahasiswa.

Menjawab Panggilan Nurani

Berpolitik dalam hal ini tidak selalu berarti menjadi kader partai atau berkiprah di bidang politik formal. Berpolitik berarti menjawab panggilan hati nurani untuk memperbaiki keadaan di sekitar kita. Laki-laki dan perempuan, tentu sama-sama berpeluang untuk berkontribusi bagi masyarakat. Seringkali perempuan dianggap tidak punya peran penting dan tak bersuara. Padahal, perempuan – dalam berbagai posisinya, jika merespons panggilan nuraninya, dapat membawa perubahan yang berarti.

Perempuan mana tidak tergerus nuraninya menyaksikan masyarakat miskin di perkotaan dipancing untuk masuk ke mal yang dijarah, lalu dikunci dalam mal yang sengaja dibakar? Perempuan mana yang rela ketika rombongan tak dikenal melakukan pemerkosaan massal terhadap perempuan beretnis Tionghoa, termasuk ibu dan anak-anaknya?

Pada pertengahan Mei 1998, tubuh perempuan dan masyarakat yang terpinggirkan sama-sama telah menjadi ajang kekerasan – sebagai teror dalam situasi konflik. Pola yang sama terjadi di berbagai wilayah konflik di dalam maupun luar negeri: di Aceh, Papua, Timor Leste, Bosnia,



Para aktivis Suara Ibu Peduli menggelar aksi damai di Bundaran H.I. pada Februari 1998. (Sumber: The Jakarta Post)



Peringatan Hari Wanita Internasional di Istora Senayan pada 8 Maret 1966. (Sumber: Perpusnas)

Afrika. Di mana ada perang dan situasi konflik, di situ pula tubuh perempuan dipertaruhkan.

Oleh sebab itu pasca kerusuhan Mei 1998, berbondong-bondong perempuan, pegawai kantor sampai pedagang kaki lima, perempuan dari berbagai kelompok agama dan etnis, menawarkan diri menjadi relawan. Mereka berkumpul di kantor Kalyanamitra mengumpulkan sumbangan pakaian dan makanan, mendampingi korban, menjadi fasilitator diskusi di sekolah-sekolah dan komunitas. Intinya, mereka tidak rela membiarkan kebiadaban terjadi, dan ingin berbuat apa saja untuk meringankan penderitaan sesama.

Tentu bukan hanya perempuan yang tergerak pada saat itu. Tetapi, sebagai sesama perempuan, yang secara struktural masih rentan mengalami kekerasan, mereka digerakkan oleh rasa empati dan solidaritas. Gerakan perempuan pasca Mei 1998 yang tergabung dalam Masyarakat Anti Kekerasan, pada akhirnya dapat “mendesak” pemerintah – pada waktu itu dipimpin oleh Presiden Habibie – untuk membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Disebut juga dengan Komnas Perempuan, lembaga ini merupakan institusi negara di bawah pengawasan Presiden, yang mempunyai mandat untuk mendata dan memberikan masukan terkait kekerasan terhadap perempuan di seluruh negeri.

Ancaman Kekerasan di Masa Kini?

Sayangnya, gerakan anti kekerasan terhadap perempuan harus terus berpacu dengan

perkembangan rezim otoriter, konflik dan perang, serta maraknya rasisme dan kebencian antar kelompok. Di Afrika Barat, kelompok Boko Haram menculik anak-anak perempuan dari satu sekolah. Di Suriah, serbuan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) menyebabkan orangtua menggondong anak-anak dan bayi menyeberangi perbatasan dan lautan – kelaparan dan kedinginan – untuk ditolak di negara-negara “demokrasi”. Di negeri kita, seorang gadis bernama Putri yang baru berusia belasan tahun, membunuh dirinya karena malu. Dia ditangkap polisi syariah ketika pulang larut malam sehabis menonton pertunjukan publik di lapangan ramai bersama teman-teman sekolah. Di berbagai daerah, anak-anak perempuan yang baru atau bahkan belum lepas haid dikawinkan dengan berbagai alasan.

Kemiskinan, rendahnya pendidikan, wawasan yang terbatas, membuat dunia untuk anak perempuan menjadi terbatas. Ruang publik – bahkan rumahnya sendiri, berpeluang menjadi tidak aman. Di jalanan ia rentan dilecehkan, karena penampilan – yang seringkali tidak dapat ditolaknya. Perempuan dari kelompok minoritas mengalami diskriminasi ganda, karena ia perempuan dan karena ia berasal dari kelompok “yang salah”. Anak-anak keluarga miskin terpaksa “dijual” atau menjual diri untuk bertahan hidup. Bagaimana anak perempuan di bawah umur harus menjadi seorang istri dan ibu yang tahu akan hak dan mempunyai kemampuan serta pengetahuan untuk mengatasi permasalahan rumah tangganya? Ia rentan dari kekerasan rumah tangga, oleh orang-orang terdekatnya sendiri.

Bagaimana perempuan dan laki-laki yang punya hati nurani menanggapi semua kenyataan ini? Daftar kekerasan struktural yang panjang dapat membuat kita menjadi apatis dan merasa tak mampu berbuat apa-apa. Tetapi contoh-contoh kecil dari kejadian di sekitar kita menyadarkan bahwa seorang perempuan dapat melakukan perubahan, bahkan hanya dengan senyum dan sapaannya. Saya pernah mendengar suatu pengalaman dari daerah konflik di Ambon. Pada saat itu kelompok “merah” dan “putih” sedang saling beradu kekerasan. Suatu ketika rombongan lawan datang menyerang sebuah kampung yang dihuni kelompok berseberangan. Ketika sampai di sebuah pasar, seorang ibu yang sedang berjualan mengenali salah satu pemuda anggota rombongan penyerang. Ibu itu segera menyapa pemuda itu dan mengingatkan bahwa ibu sang pemuda adalah pelanggannya yang setia. Mereka saling bersahabat sejak lama. Pesannya kurang lebih, apakah bisa kau sampaikan kepada Ibumu, telah kau bakar lapak sahabatnya? Perusakan tidak jadi dilakukan. Seorang Ibu yang mempunyai jaringan persahabatan lintas batas dapat membuat perubahan.

Dari Mana Datangnya Prasangka?

Pertanyaannya sekarang, dari mana datang kebencian dan perang, dari mana datang hati damai dan toleransi? Kapan seorang bayi merasakan kasih atau penolakan, kapan ia belajar bahasa sayang atau benci terhadap orang lain atau diri sendiri? Keluarga dan lingkungan rumah adalah ruang

sosialisasi yang pertama. Secara langsung atau tidak orang tua, saudara, menularkan stereotip, prasangka atau kecurigaan kepada “yang lain.” Saya masih ingat, ketika kecil, pengasuh atau orang-orang dewasa sekitar saya sering mengingatkan: “Kamu kan perempuan, jangan *ndayak* begitu.” Kata *ndayak* dalam pemahaman lingkungan saya waktu itu berkonotasi negatif: berperilaku liar, ugal-ugalan, dan berpenampilan acak-acakan. Waktu kecil saya senang naik pohon kesayangan di kebun, membayangkan diri tinggal di hutan dan main panah-panahan. Saya kurang suka main boneka atau masak-memasak. Melalui peringatan itu, saya diajarkan dua hal. Yang pertama bahwa sebagai perempuan ada aturan perilaku mana yang berterima dan mana yang tidak. Yang kedua dan tidak disadari adalah sosialisasi stereotip tentang suku Dayak, yang dianggap liar dan primitif.

Dari mana istilah itu datang? Ada banyak warisan ingatan yang datang dari masa kolonial, ketika pemukiman terpilah-pilah (Kampung Ambon, Kampung Bali, Pecinan). Bahkan jika ada pemberontakan di satu tempat, kelompok etnis lain didatangkan sebagai “Belanda hitam” untuk menumpasnya. Orang Cina diberi tugas menariki pajak manusia digolongkan berdasarkan lapisan, yang satu lebih tinggi dari yang lainnya. Eropa di lapisan atas, Timur Asing (Arab, India, Cina, Jepang) di lapisan kedua, dan “pribumi” di lapisan terbawah. Tentu kita tidak bisa menumpahkan kesalahan pada penjajah.

Stereotip memang merupakan mekanisme otak manusia untuk memahami kelompok orang

lain yang tidak kita kenal. Melalui buku pelajaran kita mengingat ciri-ciri khas sebuah negara atau kelompok: Orang Aceh menari seudati, Orang Minang punya lembaga Nagari, dan seterusnya. Jika kita tidak pernah berinteraksi, hanya ciri-ciri khas itu yang menempel dalam ingatan. Dalam sebuah acara lokakarya, seorang teman dari Ambon menceritakan dengan getir, bagaimana ketika ia berkunjung ke rumah teman di Jawa, orangtua sang teman heran karena kulitnya putih, rambutnya lurus, dan mengira ia tidak biasa makan nasi karena hanya tahu sagu. Stereotip disosialisasikan di media massa, melalui iklan di televisi, budaya populer dan karya seni, dan bisa saja terbawa dalam ajaran, khotbah dan ceramah.

Stereotip bisa bersifat netral, tapi bisa juga mengandung konotasi negatif yang menimbulkan prasangka, rasa takut, dan bahkan bisa mengarah pada penolakan. Jika seorang mulai ditolak atau dibedakan perlakuannya karena latar belakang etnis, ras, agama, jenis kelamin, dan lapisan sosialnya, maka ia mengalami diskriminasi. Diskriminasi yang disertai kebencian dan keinginan untuk menyingkirkan atau membunuh mewujudkan pada rasisme. Penolakan dan kekerasan dapat terjadi di ruang publik, di sekolah, ruang bermain, di kantor, di jalan dan kendaraan umum. Rasisme dan diskriminasi bahkan dapat dilembagakan melalui aturan, undang-undang dan dipraktikkan melalui kebiasaan dan tradisi. Jika di masa kolonial kita dikotakkan oleh penguasa, saat ini masyarakat mengotakkan diri melalui pemukiman berbasis satu lapisan sosial, agama atau etnis, dan pembatasan pergaulan.





Presiden Sukarno pada wanita PSII di Istora Senayan, Jakarta 1966.
(Sumber: Perpusnas)

Padahal, relasi yang terbatas cenderung menguatkan stereotip. Sebaliknya, semakin mendalam interaksi terjadi, maka relasi antarmanusia semakin bersifat personal. Orang yang kita kenal menjadi individu yang kompleks, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Ia mempunyai nama, pengalaman hidup, hobi, pikiran dan perasaan yang membedakan dan pada gilirannya juga menyamakan kita sebagai sesama manusia.

Menebarkan Jala Perlindungan

Semakin tinggi kebencian, rasisme dan konflik, semakin rentan posisi perempuan. Semakin lapang hati dan toleransi terhadap keragaman, semakin aman hidup anak-anak perempuan. Lalu, bagaimana kita menebarkan jaring perlindungan agar sesama perempuan, saudara, kerabat, anak dan cucu kita dapat tinggal di sebuah lingkungan dan dunia yang aman dan nyaman, agar mereka dapat bermimpi setinggi mungkin dan dapat menjadi yang terbaik dari diri mereka masing-masing?

Kita sudah melihat bagaimana keluarga, sekolah, media massa, ruang publik, hukum, adat dan kebiasaan, pengajaran agama, pemukiman dan praktik di masyarakat berpotensi mengukuhkan prasangka. Pada saat yang sama, sarana yang sama juga dapat dipakai untuk memahami, membangun empati dan solidaritas. Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan dapat ikut menebarkan jala perlindungan melalui pengasuhan anak, obrolan saat makan keluarga, interaksi dengan tetangga, komentar yang meneduhkan di grup WhatsApp dan

media sosial, dan melalui pekerjaan atau karirnya masing-masing. Perempuan dari berbagai lapisan masyarakat menunjukkan kepeduliannya dengan memasak untuk dapur umum, atau membuat nasi bungkus di saat krisis dan bencana, mengumpulkan “koin untuk Prita”, berpawai untuk mendukung kebhinekaan yang damai. Ada yang mengubah cerita, lagu, atau mendongeng untuk anak-anak, agar imajinasi tentang dunia yang penuh warna selalu terjaga. Sebagai guru, tantangan pendidik adalah untuk mengubah apa yang sudah tertanam dan dibudayakan. Dapatkah kita memutus rantai tradisi “memlonco” siswa baru oleh kakak kelas – dengan mendorong satu generasi untuk membuat perubahan bagi masa depan? Sebagai pimpinan di kantor, anggota komunitas, bagaimana kita dapat mencari ruang alternatif – jika struktur cenderung untuk memformalkan diskriminasi?

Perempuan – yang rentan mengalami kekerasan struktural, dan secara umum menempati posisi penting dalam pengasuhan anak dan jejaring sosial, punya peluang besar menanamkan toleransi. Di tengah hiruk-pikuk kebencian yang diberi corong oleh media massa, di tengah tarik-menarik berbagai perbedaan, suara perempuan yang peduli tak pernah tenggelam. Keberanian perempuan untuk mengatakan “tidak” terhadap kekerasan berbasis apa pun, dan menyumbangkan tenaga, pikiran dan tindakan untuk menciptakan rumah damai untuk semua, sudah ditunjukkan para perempuan peduli – dari masa ke masa. Kita lanjutkan perjuangan mereka.



Gedung Joyodipuran, tempat pelaksanaan Kongres Perempuan I pada 1928 dan saat ini menjadi kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya, Jalan Brigjen Katamso No.139, Yogyakarta. Atas: foto dipotret pada era 1940an (Sumber: Perpusnas). Bawah: foto dipotret pada 2013. (Sumber: BPNB Yogyakarta)



Pemilik Gedung Joyodipuran, K.R.T. Joyodipura (1878-1938), seorang seniman, keponakan Hamengku Buwono VII.
(Sumber: BPNB Yogyakarta)

Perempuan Pejuang Tanah Air

Wawancara Siti Maemunah dengan Aleta Baun

Siti Maemunah*

Tanah air dan perempuan adalah dua hal yang selalu diperjuangkan Aleta Baun. Pikiran dan pesan Aleta Baun (51 tahun) tentang perjuangan tanah air merupakan pengalaman dan pengetahuan perempuan yang tak lekang dimakan waktu, bahkan terbukti melintasi batas negara. Salah satunya disampaikan Aleta di hadapan perwakilan 65 negara peserta World Culture Forum pada 11 Oktober 2016 di Bali. Pidatonya bertajuk “Kami tak jual yang tidak bisa kami buat” diberitakan media massa sebagai pidato yang berhasil menggetarkan forum itu. Sebelumnya, April 2013, saat menerima penghargaan Goldman Prize Award di San Francisco, Amerika Serikat, pidato Aleta juga dikutip banyak media internasional, salah satunya *Earth Island Journal*. Bahkan, media tersebut mengutipnya untuk mengkritik pematenan gen masyarakat adat Myriad oleh industri farmasi yang kasusnya sedang disidangkan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Ini kasus besar yang menentukan masa depan industri bioteknologi dalam hal pematenan berbagai gen makhluk hidup. Enam bulan kemudian, pengadilan memutuskan bahwa paten gen manusia dilarang. Kedua pidato di atas juga berisi pengetahuan, pengalaman, dan pesan Aleta menyelamatkan tanah air orang Mollo di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.



Aleta Baun bercakap-cakap dengan salah satu tetua masyarakat adat tiga batu tungku Mollo, Amanuban dan Amanatun di kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, 2014. (Sumber: koleksi pribadi Siti Maemunah)

Tujuh belas tahun lalu, Aleta masuk daftar pencarian orang Kepolisian Timor Tengah Selatan. Ia musuh utama Bupati Timor Tengah Selatan, dan orang yang paling dicari dibalik penolakan masyarakat adat Mollo terhadap perusahaan tambang marmer di Desa Fatukoto. Pada 2006, Aleta bermusuhan dengan Bupati Timor Tengah Selatan lainnya karena dianggap bertanggung jawab terhadap aksi ratusan warga, khususnya kaum perempuan – yang menduduki tambang marmer dengan menenun selama dua bulan di Desa Fatumnasi dan Kuanoel. Mereka menuntut penghentian tambang marmer milik pengusaha Jakarta itu.

Ketika perjuangan menyelamatkan tanah air itu dimulai, Aleta adalah perempuan Mollo, anak seorang *amaf*, istri seorang guru, dan ibu dua anak. Ia pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan berhasil lulus SMA Kristen di Kupang. Ia harus masuk kampung pada malam hari untuk bertemu rakyat, dan agar tak dicegat preman serta ditangkap polisi, lalu segera menghilang saat matahari terbit. Ia bersama rakyat Mollo menghadapi intimidasi dan kekerasan oleh preman yang dibayar perusahaan. Aleta pun terpaksa mengungsi dari rumahnya beberapa bulan, membawa bayinya yang berusia dua bulan, dan keluar-masuk kampung serta bersembunyi di hutan. Perjuangan berat yang dialaminya itu kemudian justru mengubah perjalanan hidupnya.

Mengapa Aleta tak henti memperjuangkan kedaulatan atas tanah airnya itu? Latar belakang dan kekuatan apa yang sesungguhnya membuat perempuan kampung tersebut tampil memimpin

perjuangan tanah air? Dua hal penting inilah yang kita pikirkan saat merayakan Hari Ibu Bangsa, 22 Desember 2016.

Siti Maimunah (SM) mengajak kita menyimak percakapan dengan Aleta Baun, yang biasa dipanggil Mama Aleta (MA), untuk mencukil sebagian pengetahuan, pengalaman, dan pesannya memperjuangkan tanah air.

SM: Apa asal-usul pesan yang disampaikan Mama kepada dunia: "Kami tak jual yang tidak bisa kami buat"?

MA: Itu dari pengalaman kami Orang Mollo menyelamatkan alam. Kami berjuang selama tiga belas tahun menutup tambang marmer. Kami berikrar untuk tidak lagi membiarkan pembangunan dan ekonomi yang merusak alam. Kami berikrar untuk mandiri. Hingga saat ini, kami masih berjuang memulihkan alam.

SM: Mengapa Orang Mollo sangat peduli terhadap alam?

MA: Sebab, orang Mollo percaya alam bagaikan tubuh manusia. Kami percaya *fatu, nasi, noel, afu amsan a'fatif neu monit mansian*. Batu sebagai tulang, tanah sebagai daging, air sebagai darah, dan hutan sebagai kulit, paru-paru dan rambut. Jika kita merusak alam, kita seperti merusak tubuh sendiri. Seperti hutan yang memiliki fungsi menjaga lahan dan melindungi sumber-sumber air, seperti kulit dan rambut yang melindungi daging dan darah. Jika hutan rusak, maka tanah-tanah menjadi miskin,

tidak subur. Batu memberikan kekuatan, seperti kerangka tubuh manusia. Jika hujan, tak ada batu, hanya tanah, maka orang hanya akan injak rawa-rawa. Tak ada yang bisa beri kekuatan. Gunung batu juga menyimpan air, di bawahnya selalu ada sumber air.

SM: Saya dengar gunung batu itu bernilai ekonomi tinggi, mengandung marmer, dan menjadi incaran pengusaha tambang?

MA: Kami baru tahu sebutan marmer itu saat pengusaha tambang masuk. Awalnya kami juga tidak tahu marmer itu untuk apa. Mereka bilang itu diekspor ke Jepang. Pada tahun 1990-an, tanpa bertanya kepada kami, pemerintah kasih keluar ijin-ijin tambang. Awal-awal, PT So'e Indah Marmer dan PT Karya Asta Alam menambang Fatunaususu dan Fatuanjaf di Desa Fatukoto. Naususu ini batu yang paling besar, seperti ibunya para batu. *Naususu* artinya menyusui, di bawah batu ini mengalir sumber air. Naususu juga ritus adat, tempat kami menyimpan pusaka kerajaan dan alat-alat untuk ritual adat, seperti patung, gong, dan tombak. Sejak tambang datang, ribuan pohon di sekitar gunung batu dipotong, lahan sekitarnya longsor, air hilang, barang-barang pusaka adat mereka curi.

Ternyata tak hanya Naususu, beberapa perusahaan tambang diberi ijin pemerintah untuk kasih hancur gunung batu. Ada PT Setia Pramesti di Ajobaki, PT Semesta Alam Marmer di Desa Tunua, PT Sagared Mining di Desa Fatumnutu dan yang terakhir PT Teja Sekawan

di Desa Fatumnasi-Kuanoel. Semuanya berhasil kami usir, terakhir tahun 2006.

SM: Apa yang mendorong orang Mollo bersatu untuk mengusir perusahaan tambang?

MA: Kami tak mau kehilangan identitas orang Mollo. Marga-marga orang Mollo berasal dari gunung batu, yang disebut *Fautkanaf*. Kami mengenal *fautkanaf*, *haukanaf* dan *oekanaf*. Atau batu nama, kayu nama dan air nama. Orang Timor atau *Atoen meto* memiliki *Kanfatun*, nama yang diperoleh dari batu tempat leluhur berasal dan merupakan akar dan batang dari pohon keluarga. Ritus-ritus adat kami ada di sekitar gunung batu, kayu atau hutan, dan sumber air. Asal-muasal leluhur kami, adat kami akan hilang ketika gunung batu dihancurkan, hutan dan sumber air dirusak. Perempuan, ibu seperti saya, paling menderita, karena kami yang bertanggung jawab menyediakan air dan makanan untuk keluarga.

SM: Jadi, perempuan lah yang paling menentang perusakan alam? Apa yang dilakukan perempuan Mollo untuk menyelamatkan alam dan identitas adatnya?

MA: Iya. Sebab alam itu seperti tubuh perempuan. Alam menyediakan segalanya bagi manusia sehingga kami bisa tanam, kami ambil air untuk menyiram tanaman, untuk memasak. Perempuan menyediakan pangan keluarga. Saat alam rusak, kami paling susah. Air yang semula dekat dicemari limbah tambang, sehingga kami harus berjalan makin jauh mendapatkan air. Lahan pertanian longsor

sehingga persediaan makanan juga terganggu. Sebagai ibu, sebagai perempuan, kami tidak bisa diam.

Mama-mama dan perempuan muda, lebih seratus orang, mendatangi wilayah tambang. Kami duduk dan tak mau pergi dari sana sampai perusahaan berhenti dan pergi. Kami duduk, kami diskusi, kami menenun, kami buat dapur umum. Kegiatan perempuan di rumah kami pindahkan ke sekitar gunung batu. Kami tinggalkan keluarga di rumah, bawa alat tenun, dan mulai menenun di sana. Kami juga memperingati natal di bawah *fautlik* dan *faut Ob*. Kami menenun di sana dua bulan hingga perusahaan berhenti.

SM: Mengapa melakukan penolakan dengan cara menenun? Jika perempuan yang menduduki tambang, kaum laki-laki ada di mana?

MA: Tenun adalah identitas adat orang Timor. Lelaki menggunakan selimut atau *mauk*, sementara perempuan menggunakan sarung atau biasa kami sebut *tais*. Tenun yang membedakan kita sebagai orang Timor.

Tenun pekerjaan sehari-hari perempuan. Sejak kecil saya diajari menenun. Sambil menenun di malam hari, mama ajar saya tentang kekayaan alam, tentang adat, tentang tanggung jawab perempuan. Semua bahan tenun juga didapat dari alam. Kapas ditanam untuk benang. Kayu ampupu dan cemara yang sudah tua dipakai untuk penjepit benang. Serat pohon enau untuk ikat peralatan tenun. Batang pohon tanduk yang licin untuk memisahkan

benang atas dengan benang bawah. Pewarna juga berasal dari kebun dan hutan. Akar mengkudu untuk pewarna merah. Daun nila menjadi pewarna hitam. Daun arbila untuk pewarna hijau. Perempuan menjaga identitas orang Timor dan menjaga alam karena mereka yang menenun.

Perempuan dan laki-laki harus bersatu. Kami berbagi peran dengan laki-laki saat berjuang. Laki-laki urus rumah, urus anak, bergantian. Kami juga bekerja gotong-royong di lahan orang lain agar dapat upah untuk membiayai perjuangan.

SM: Perjuangan menyelamatkan Mollo ini membutuhkan waktu lama. Mama Aleta memimpin perjuangan rakyat Mollo hingga semua perusahaan tutup. Apa tantangan sebagai perempuan memimpin perjuangan tanah air ini?

(Mama Aleta berhenti sejenak, menggelengkan kepalanya sebentar sambil mengingat kesulitan yang dia hadapi kala memimpin perjuangan rakyat Mollo)

MA: Aih banyak yang harus saya tanggung. Saya dan teman-teman menghadapi teror dari preman, di rumah, di jalan, bahkan saat demo di kantor bupati. Kami dihina, dilempar batu. Saya diancam diperkosa. Saya mendapat teror dari aparat keamanan. Mereka mengancam akan tangkap dan penjara saya karena dianggap mengganggu program pembangunan.

Saya hanya bisa keluar malam hari untuk bertemu dengan rakyat. Satu malam, saya dengan ojek pulang dari desa. Saya pulang ke rumah untuk menyusui bayi, umurnya baru dua bulan. Di jalan menuju Desa Kapan, kami dihadang motor, tujuh orang. Mereka bilang disuruh Bupati. Preman pakai kerudung hitam. Dia ancam bunuh saya. Rambut saya dijambak, ditampar, dan ditendang berkali-kali. Mereka hampir parang kaki saya, tapi luput. Saya dilepas setelah uang di dompet diambil.

Satu minggu setelah itu, ada ancaman lagi dari pekerja tambang. Rumah saya dikepung sehingga tidak bisa masuk rumah. Saya harus lari ke hutan membawa bayi dan pisah dengan suami dan dua anak saya yang lain selama enam bulan. Keluarga saya juga mendapat kekerasan. Anak kedua, laki-laki, mendapat lemparan batu di kepala sampai bocor. Anak-anak tidak nyaman bersekolah di kota. Mereka pindah sekolah di kampung.

SM: Apa yang paling berat Mama hadapi saat perjuangan?

MA: Yang paling berat adalah tekanan dari orang sekitar, keluarga, tetangga, termasuk dari perempuan. Biasanya datang dari warga pro pertambangan. Saya dianggap pelacur karena sering di luar rumah. Dikatakan perempuan malam, tidak mempunyai harga diri, naik ojek turun ojek, tidak tidur di rumah, tidak mengurus rumah tangga, bahkan dituduh selingkuh dengan tukang ojek. Saya sebetulnya merasa malu, sakit hati dan sedih membayangkan

apa yang dipikirkan mereka tentang saya. Tapi suami mendukung saya, jadi saya terus berjuang.

SM: Orang Mollo menang. Pertambangan yang merusak berhasil dihentikan. Apakah itu cukup? Apa selanjutnya setelah pertambangan berhenti?

MA: Kemenangan itu hanya awal, tak cukup. Sebab, sebelum ada pertambangan, kebun dan hutan adat kami banyak diubah menjadi hutan milik negara. Akibatnya banyak mata air yang dangkal dan hilang, banyak ternak tak bisa lagi merumput dan minum. Pohon-pohon hutan ditebas, ditanami mahoni, jati, akasia dan gemilina, menjadi seragam. Lahan kami tak hanya menyempit. Kayu bakar juga susah dicari, juga kayu untuk pagar kebun dan bertani. Status hutan adat dibuat menjadi kabur, lantas diklaim menjadi hutan negara. Tantangan kami berikutnya adalah bagaimana memulihkan alam yang rusak, dan berpikir jauh ke depan untuk memilih ekonomi yang berkelanjutan.

Kami berpikir keras untuk menemukan caranya. Kami membuat organisasi masyarakat adat OAT, Organisasi Attaemamus. Saya memimpin organisasi ini sejak 2004. Kami membuat diskusi dengan tokoh adat, dengan anak muda. Kami membuat ritual. Kami memutuskan sikap untuk menolak ekonomi yang merusak alam, merusak adat kami. Pada sebuah musyawarah adat, kami bersepakat memperjuangkan kehidupan yang mandiri dan berdaulat. Kami hanya akan menjual apa

yang bisa kami buat. Kami tak akan menjual apa yang tidak bisa kami buat. Kami tak akan menjual lahan, sungai, hutan, gunung, dan air. Kami harus menata produksi dan konsumsi kami.

SM: Bagaimana Mama dan kawan-kawan melakukan pemulihan alam, menata produksi dan konsumsi?

MA: Lewat organisasi, kami orang Mollo bersatu, dan menyatukan perjuangan dengan orang Amanuban dan Amanatun. Kami bikin *lopo* bersama di lokasi batu Naususu, yang kini menjadi tempat pertemuan adat, tempat belajar kami. Tiap dua tahun kami berkumpul di sana, mengadakan Festival Ningkam Haumeni, untuk terus merayakan perjuangan. Kami mengingat kembali perjuangan, bertukar pengalaman antar desa, antar suku di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kami juga bikin *fanu*. Kami membentuk kelompok perempuan penenun dan kelompok pertanian organik serta kelompok ternak. Kami melakukan penghijauan di sekitar sumber air dengan tanaman asli, dan membangun lumbung-lumbung pangan untuk menghadapi paceklik dan musim yang makin tak menentu. Kami kembali menanam pangan lokal, seperti sorgum dan jenis lainnya. Kami juga memperbanyak pewarna alami untuk tenun.

Kelompok tenun dan kelompok tani kami makin banyak, tapi perjuangan kami masih panjang, termasuk memperluas hutan untuk perlindungan mata air. Kami tak bisa

menunggu pemerintah untuk memulihkan tanah air. Terlalu lama. Tapi kami juga tak mau pemerintah hanya datang kasih proyek, kasih repot kami dan merugikan seperti dulu.

Sejak 2014, perjuangan Aleta memasuki babak baru. Ia dipilih rakyat Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi wakil mereka di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia salah satu dari lima perempuan wakil rakyat di sana. Kini, Mama Aleta bagian dari Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD NTT dan bertugas di Komisi V yang menangani kesejahteraan rakyat, meliputi urusan kesehatan, pendidikan, olahraga, penanganan bencana alam, sosial, tenaga kerja dan perempuan. Penampilannya sedikit berubah, karena ia harus menyesuaikan perannya saat ini. Tapi, pakaian dinas tak pernah lepas dari identitas adat. Ia mengikat kepalanya dengan tenun. Perjuangannya menyelamatkan tanah air juga tidak berubah. Ia sangat gigih menolak beroperasinya tambang mangan PT Soe Makmur Resources, dan di saat yang sama ia berupaya menyelamatkan banyak perempuan NTT yang menjadi korban perdagangan manusia.

Dalam perjalanannya memperjuangkan tanah air dan sebagai perempuan, Mama Aleta memiliki pengalaman luar biasa yakni mulai berseberangan dengan pemerintah, melawan perusahaan tambang yang merusak, hingga menjadi wakil rakyat. Pemikiran apa yang ditawarkan Mama Aleta dalam perjuangan tanah air ke depan?

SM: Sebagai perempuan wakil rakyat, apa yang menjadi perhatian Mama Aleta?





Aleta Baun memimpin diskusi tentang pangan pada festival Ningkam Haumeni di Batu Naususu, Desa Tafukoto, Mollo, NTT.
(Sumber: Koleksi pribadi Siti Maemunah)

MA: Saya memikirkan generasi ke depan. Saat ini anak-anak muda NTT, khususnya perempuan, banyak yang meninggalkan kampung, pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Jumlahnya lebih dari 14 ribu orang, sebagian besar adalah perempuan. Hanya 35 persen yang mengurus administrasi keberangkatan dengan tertib. Sisanya tidak tahu. Jumlah terbesar ini berpotensi menjadi korban perdagangan manusia. Belum lagi mereka yang meninggalkan kampung dan pergi ke Kalimantan untuk bekerja di perkebunan sawit dengan gaji yang rendah dan jaminan kesehatan yang tidak memadai. Jumlahnya makin meningkat.

SM: Bukankah isu perdagangan manusia itu isu lama? Mengapa banyak orang memilih keluar dari kampungnya?

MA: Benar ini isu lama yang harus kita urus lebih serius. Makin banyak orang pergi meninggalkan kampung mencari penghidupan karena musim yang berubah, makin susah diramalkan. Jumlah hujan berkurang, atau datang terlalu cepat, sehingga gagal panen dan mengalami kelaparan, terutama di daerah pesisir. Tapi alam berubah ini tidak terjadi dengan sendirinya. Perusakan hutan di masa lalu, program reboisasi yang mengubah tanaman asli, dan penanaman hutan tanaman industri, seperti pengalaman kami di Mollo, telah membuat sumber air berkurang. Lahan makin tidak subur dan jenis-jenis tanaman lokal menghilang. Kita harus belajar lebih keras

bagaimana menyesuaikan dengan kondisi alam yang berubah.

Saya makin menyadari bahwa perjuangan menyelamatkan dan memulihkan alam adalah perjuangan untuk generasi ke depan.

SM: Apa hal penting yang harus kita tekankan dalam perjuangan generasi ke depan?

MA: Ada dua, pengetahuan yang kembali ke alam dan pengetahuan perempuan. Pengetahuan manusia semuanya berawal belajar dari alam. Banyak pengetahuan yang kita lupakan berkaitan dengan alam. Kita sibuk berlomba untuk belajar, S1, S2, S3 sampai S teler. Kita lupa pengetahuan di kampung, tak pernah dibuka-buka, yaitu bagaimana hubungan manusia dengan bumi. Akibatnya generasi sekarang tidak peduli pada alam, pada kampungnya, pada manusia. Dia seperti membenci bumi.

SM: Apakah pengetahuan yang dimaksud hanya berlaku untuk mereka yang dekat dengan kekayaan alam? Bagaimana dengan warga kota seperti Jakarta?

MA: Ini berlaku semua, juga untuk orang di Jakarta. Pertanyaan saya. Apakah orang kota buka mulut, lantas makanan tersedia dan masuk begitu saja ke mulut? Jika dia makan nasi, makan daging, makan sayur, dari mana itu didapat? Kau beli di supermarket? Iya. Tapi siapa yang taruh di situ? Di mana sayur ditumbuhkan, padi ditanam? Itu dari padi yang ditanam di kampung. Orang kota mestinya malu pada orang kampung. Itu semua dari bumi yang mereka pijak, tapi dia tak menghargai.

Tak ada yang terpisah dari alam. Kalau kau minum air, berarti kau makan dari alam. Tak ada yang terlepas dari alam. Inilah yang kosong dalam pendidikan kita, memahami hubungan kita dengan alam. Kita seperti hanya belajar di permukaan, belajar tentang daun saja, yang digunting-gunting. Pendidikan kita tidak mengakar dan tidak berbatang. Generasi muda seperti tak punya akar. Mereka yang di kota lupa pada alam, tidak peduli pada kampung, sedangkan kampung ingin pindah ke kota. Kita harus isi pendidikan kita dengan pengetahuan tentang hubungan dengan alam, dengan budaya, adat kita.

SM: Bagaimana hubungannya dengan pengetahuan perempuan?

MA: Seperti saya bilang, alam itu seperti perempuan. Kita bicara hubungan pengetahuan dengan perempuan. Ibu yang pertama mengenalkan anak dengan alam, yang lebih dekat dengan pendidikan adalah perempuan. Ibu mengenalkan anak pada pohon, air, batu. Maka jika dia tidak mengenal alam, dia lupa pada buminya berpijak. Tapi jika dia tahu tentang alam, dia akan ingat pada ibunya, dia tak akan menganggap bumi yang dipijaknya, atau tanah airnya itu biasa saja.

Perempuan mengajarkan bumi itu tidak mati, dia hidup. Kita harus mengajarkan kembali bahwa alam itu hidup, bernyawa.

SM: Terakhir, apakah duduk sebagai wakil rakyat memberikan cukup ruang bagi Mama Aleta untuk memperjuangkan agenda-agenda rakyat?

MA: Sebenarnya sulit memasukkan perjuangan dari luar. Mengapa? Pertama, karena tiap partai sudah punya agendanya sendiri, pemerintah juga punya agenda sendiri. Kedua, tiap anggota DPR juga masuk dengan kepentingan masing-masing. Ketiga. Anggota DPR tak banyak memahami tentang sumber daya alam. Keempat belum banyak yang memahami isu-isu gender.

Apa peluang yang saya miliki? Sebagai DPR, saya punya kekuatan untuk berbicara dengan SKPD. Saya juga punya modal untuk berkegiatan dengan organisasi. Saat reses, sebagai anggota DPR, saya bisa bertemu dengan rakyat. Saya punya kekuatan. Saya bisa mempengaruhi rakyat untuk berani kritis terhadap negara. Strategi saya adalah tidak pernah menutup informasi kepada rakyat, baik tentang anggaran, program, sikap, perilaku DPR. Saya buka itu lebar-lebar. Ketika saya membuka itu, saya memperkuat rakyat. Satu-satunya rakyat yang bisa mengubah kebijakan. Kami di dalam tidak. Yang harus dikuatkan adalah pulang kampung dan suruh rakyat datang.

*Aktivis lingkungan dan peneliti di Sajogyo Institute.



<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id>



ISBN 978-602-1269-42-6



9 786021 289426